

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KAJIAN PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
LOKAL TERHADAP PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN DAN STRATEGI PERWUJUDAN
DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan

Disusun Oleh :

GETREDA MELSINA HEHANUSSA

NIM. 018490593

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRAK

Kajian Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Strategi Perwujudan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Getreda M. Hehanussa
Universitas Terbuka
getreda75@gmail.com

Penetapan kawasan konservasi merupakan perwujudan dari pengembangan Struktur Tata Ruang yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Peran serta masyarakat harus dilibatkan pada identifikasi, perancangan, dan pelaksanaan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan kawasan konservasi. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa keberhasilan upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, tetapi juga tergantung dari partisipasi masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi perairan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan persepsi, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam penetapan kawasan konservasi perairan. Metode penelitian ini adalah survei dengan penekanan pada variabel persepsi, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah. Nilai skor yang digunakan untuk persepsi dan partisipasi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yaitu *skala Likert*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan mempunyai tingkat persepsi rendah hingga sedang, 53,19% responden sangat mendukung, 35% responden cukup mendukung dan 11,14% responden kurang mendukung rencana penetapan kawasan konservasi di Kota Sorong. Tingkat partisipasi nelayan berada pada tingkat partisipasi rendah (37%-56%) dan masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan penebangan mangrove. Sedangkan dalam pengawasan, partisipasinya rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pentingnya hutan mangrove. Peran pemerintah dalam penetapan Kawasan Konservasi pada Kelurahan Pulau Raam, Pulau Soop, dan Remu Selatan tergolong pada tingkat sedang (54,3% - 64,58%), sedangkan pada Kelurahan Saoka dan Klaligi tergolong rendah. Hasil uji chi square didapatkan bahwa hubungan antara persepsi dan partisipasi dalam rencana penetapan kawasan konservasi perairan di Kota Sorong pada taraf signifikansi (α) = 0.05 dengan nilai X^2_{hit} (33.498) > X^2_{tabel} (9.488). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat berbeda nyata dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Sorong atau dengan kata lain hipotesis (H_0) ditolak pada derajat signifikansi (α) = 0,05. Hasil uji keamatan atau koefisien kontingensi didapatkan nilai C = 0,38 atau berada pada tingkat keamatan rendah.

Kata kunci : Kota Sorong, partisipasi nelayan, persepsi

ABSTRACT**Perception Study and Participation of Local Conservation Area
Designation of Water and Strategies Manifestations
in the Sorong City of West Papua Province**

Getreda M. Hehanussa
Universitas Terbuka
getreda75@gmail.com

Determination of the conservation area is a manifestation of the development of the Spatial Structure which is based on the principle of sustainable development. The role of the community should be involved in the identification, design and implementation of a variety of possible benefits that can be obtained from the conservation area protection. It is based on the premise that the success of water conservation efforts not only depend on not just the government, but the extent to which local communities are involved in these activities. Therefore, it is necessary to do research on perceptions and participation in the implementation of the establishment of marine protected areas. The purpose of research is to assess the relationship of perception, public participation and the role of government in the establishment of marine protected areas. The research method is a survey with emphasis on perception variables, public participation and the role of government. Value scores are used for the perception and participation of a person or group of people about social phenomena, Likert scale. The results showed that, fishermen have a low to moderate level of perception of 53.19% of respondents are very supportive enough to support the 35% and 11.14% less support proposed a conservation area in the city of Sorong fishing participation rates are at a low participation rate (37% -56 %) where the people directly involved in the felling of mangrove, while the low participation in the supervision of this is due to lack of socialization government about the importance of mangrove forests. The role of government in setting conservation area on Ram Island Village, Soop Island, and South Remu classified at the level of the role of moderate (54.3% - 64.58%) whereas in urban Saoka and Klaligi relatively low. The results of the chi square test showed that the relationship between perception and participation in the establishment of marine reserves plan in Sorong at the significance level (α) = 0:05 obtained nilai X^2 hits (33 498) > X^2 table (9488). This shows that the different perceptions and tangible community participation in the determination of the water conservation area in Sorong, or in other words the hypothesis (H_0) is rejected at the significance level (α) = 0.05. And the closeness of test results obtained or contingency coefficient value $C = 0:38$ is at the level of closeness or low.

Keywords: participation of fishermen, perception, the town of Sorong

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Kajian Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Lokal Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Strategi Perwujudan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 6 Desember 2013

Yang Menyatakan



GETREDA M. HEHANUSSA
018580788

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul Penelitian : Kajian Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Lokal Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Strategi Perwujudan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Penyusun Proposal : Getreda M. Hehanussa

N I M : 018580788

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

Hari / Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Auldry F. Walukow, M.Si.
19660409 19991111 1 001

Dr. Ir. Sri Harijati, MA.
19620911 198803 2 002

Mengetahui,

Jakarta, Januari 2014

Ketua Bidang/Ilmu
Program Magister Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan

Direktur Program Pasca Sarjana

Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si.
NIP. 19631111 198803 2 002

Suciati, M.Sc. Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama : Getreda M. Hehanussa
 NIM : 018580788
 Program Studi : Program Magister Ilmu Kelautan
 Judul TAPM : Kajian Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Lokal Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Strategi Perwujudan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Program Magister Ilmu Kelautan, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal :

Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM:

Ketua Komisi Penguji : Dr. Sardjijo, M. Si.

Penguji Ahli : Dr. Eko Sri Wiyono, M. Sc.

Pembimbing I : Dr. Auldry F. Walukow, M. Si.

Pembimbing II : Dr. Ir. Sri Harijati, MA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul **“Kajian Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Lokal terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Strategi Perwujudan Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat”**. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa banyak bantuan dan bimbingan yang telah diberikan berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penyusunan TAPM ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- 2) Kepala UPBJJ-UT Jayapura, selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- 3) Pembimbing I (Dr. Auldry F. Walukow) dan Pembimbing II (Dr. Sri Harijati, MA) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- 4) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- 5) Sahabat dan teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jayapura, Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Abstrak	i
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Bagan	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kawasan Konservasi	7
B. Penetapan Kawasan Konservasi	14
C. Persepsi Masyarakat	19
D. Partisipasi Masyarakat	21
E. Strategi Perwujudan Kawasan Konservasi Perairan	27
F. Kerangka Berpikir	29
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Desain Penelitian	30
B. Waktu dan Tempat Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel	31
D. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	32
E. Prosedur Penelitian	33
F. Metode Analisis Data	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Kota Sorong	40
1. Geografis dan Administratif	40
2. Kependudukan	43
3. Kawasan Konservasi Kota Sorong	45
4. Kawasan Perlindungan Setempat	46
5. Kawasan Konservasi mangrove	47
6. Kawasan Rawan Bencana	50

	Hal
B. Persepsi Masyarakat	53
C. Partisipasi Masyarakat	70
D. Peranan Pemerintah	75
E. Hubungan Persepsi, Partisipasi dan Peran Pemerintah Terhadap Penentuan Kawasan Konservasi Laut Daerah	78
F. Model Pendekatan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Sorong	85
BAB V. Simpulan dan Saran	97
A. Simpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99



DAFTAR BAGAN

Bagan	Hal
1. Kerangka Berpikir.....	29
2. Model Perencanaan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kota Sorong.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1 Luas Wilayah Kota Sorong	42
4.2 Wilayah Distrik dan Kelurahan Pesisir Kota Sorong.....	43
4.3 Sebaran Penduduk Kota Sorong Berdasarkan Distrik dan Kelurahan	44
4.4 Sepadan Sungai di Kota Sorong Berdasarkan Distrik.....	47
4.5 Luasan kesesuaian untuk Kawasan Konservasi Mangrove di Kota Sorong	49
4.6 Persepsi Masyarakat Mengenai Kondisi Hutan Mangrove.....	54
4.7 Persepsi Masyarakat Mengenai Kondisi Sungai	54
4.8 Persepsi Masyarakat Tentang Potensi Kawasan Sungai Dan Mangrove ..	60
4.9 Potensi Beberapa Sungai Sebagai Sumber Air Baku.....	61
4.10 Persepsi Masyarakat Tentang Keterlibatannya dalam penyusunan RTRW KKP Kota Sorong	63
4.11 Persepsi Masyarakat Tentang Aturan Kawasan Konservasi.....	65
4.12 Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Kawasan Konservasi.....	66
4.13 Persepsi Masyarakat Tentang Perlu Ditetapkan Kawasan Konservasi....	68
4.14 Dukungan Masyarakat Terhadap Keberadaan Atau Rencana Penetapan Kawasan Konservasi.....	69
4.15 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Mangrove.....	70
4.16 Partisipasi Masyarakat Dalam Eksploitasi Hutan Mangrove.....	72
4.17 Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Lingkungan.....	73
4.18 Partisipasi Masyarakat Dalam Penanaman Mangrove.....	75
4.19 Penilaian Masyarakat Tentang Peranan Pemerintah Dalam Penetapan RTRW KKP Di Kota Sorong	76
4.20 Tanggapan Masyarakat Dalam Hal Peranan Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Hutan Mangrove	77
4.21 Kategori Persepsi dan Partisipasi Masyarakat (Nelayan) dalam penetapan Kawasan Konservasi.....	79
4.22 Kategori Peran Pemerintah dalam penentuan Kawasan Konservasi	80
4.23 Total Skore Persepsi, Partisipasi dan Peran Pemerintah dalam Penetapan Kawasan Konservasi.....	82
4.24 Matriks SWOT Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Instrumen Observasi.....	101
2. A. Persepsi Masyarakat Pulau Raam Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi.....	101
B. Persepsi Masyarakat Kelurahan Remu Selatan Terhadap Penetapan KawasanKonservasi	102
C. Persepsi Masyarakat Kelurahan Saoka Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi.....	104
D. Persepsi Masyarakat Pulau Soop Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi	102
E. Persepsi Masyarakat Kelurahan Klaligi Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi	103
3. A. Partisipasi Masyarakat Pulau Raam Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi.....	104
B. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Remu Selatan Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi	105
C. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Saoka Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi.....	106
D. Partisipasi Masyarakat Pulau Soop Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi.....	107
E. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Klaligi Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi.....	108
4. Langkah-langkah Analisa Chi Square.....	109
5. Analisa SWOT	110
6. Surat Keterangan Penelitian	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan pulau-pulau di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman jenis sumberdaya pesisir dan laut baik yang terpulihkan (*renewable*), yang tidak terpulihkan (*unrenewable*) maupun jasa-jasa lingkungan (*environmental services*). Sumberdaya alam perairan bila dipadukan dengan sumberdaya manusia yang handal serta didukung dengan IPTEK yang ditunjang dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar dalam pembangunan nasional. Sumberdaya alam perairan mempunyai arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi dan preservasi lingkungan, wisata bahari dan kegiatan jasa lingkungan lainnya.

Seiring dengan banyaknya peluang usaha di berbagai wilayah pesisir telah muncul permasalahan-permasalahan pembangunan terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang over eksploitasi dan tidak bertanggung jawab. Permasalahan-permasalahan yang muncul secara umum disebabkan oleh dua hal yaitu akibat perubahan alam dan adanya aktivitas manusia. Untuk mengoptimalkan upaya pengembangan/eksploitasi sumber daya pesisir tersebut, perlu dilakukan kegiatan perencanaan, yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumberdaya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologis setempat terhadap upaya eksploitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta PERMEN Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kota Sorong merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua Barat yang memiliki letak geografis yang strategis serta memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang sangat potensial terutama untuk pengembangan sentra usaha atau pusat industri perdagangan terpadu. Kota Sorong memiliki garis pantai sepanjang \pm 43 km dengan 13 pulau kecil yang masuk dalam 1 distrik dan terbagi atas 4 kelurahan. Secara umum, wilayah pesisir memiliki morfologi pedataran pantai.

Sebagai wilayah dengan posisi yang strategis maka terlihat peningkatan pembangunan ekonomi (industri) Kota Sorong yang pesat, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya tekanan ekologis terhadap lingkungan pesisir dan laut. Oleh karena itu perlu ditetapkan kawasan konservasi guna mengurangi tekanan oleh aktifitas manusia. Kawasan konservasi atau kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumberdaya alam serta sumberdaya buatan guna pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan lindung meliputi flora dan fauna atau biota yang ada pada kawasan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir laut dan pulau kecil wilayah Kota Sorong, adalah : i). Hasil analisis kesesuaian lahan; ii). Kriteria kawasan konservasi menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1990. Dalam hal ini kawasan lindung dapat terletak di darat dan perairan pesisir menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Itu sebabnya studi terhadap tingkat persepsi masyarakat sangat penting untuk melihat sejauh mana kepedulian masyarakat lokal terhadap kelangsungan hidup sumberdaya pesisir dan laut agar terjaga kelestariannya. Karena masyarakat pesisir khususnya nelayan sebagai

pelaku sekaligus yang pertama merasakan dampak dari degradasi lingkungan kawasan pesisir tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diperlukan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dalam menentukan dan mengidentifikasi potensi perikanan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan KKP yang merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab dan mampu menjadi inspirator, inisiator dan dinamisator dalam menjaga kelestarian sumber daya secara berkelanjutan dalam KKP. Maka untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dan budaya yang optimal dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat lokal dapat memberi kontribusi dalam pengelolaan sumberdaya secara lestari. Beberapa penelitian yang dilakukan di Kawasan Timur Indonesia menggambarkan betapa efektifnya pengelolaan sumberdaya alam lokal yang didasari atas sistem tata nilai yang diwarisi secara turun-temurun. Marzali (1996) dalam Rizal 2001, mengemukakan tentang perlunya mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dalam pengelolaan hutan secara lestari. Masyarakat lokal dapat memberi kontribusi dalam pengelolaan sumberdaya secara lestari. Provinsi Papua dan Papua Barat sebagian penduduknya, terutama yang tinggal di lokasi terpencil, masih menggunakan hukum adat dalam mengatur aktivitas kehidupannya sehari-hari. Untuk Penduduk kota sorong bersifat heterogen yang terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang, mata pencaharian masyarakat yang bermukim di daerah pantai dan kepulauan yaitu: sebagai nelayan, pengolah hasil perikanan, pedagang, petani dan ada juga sebagai pegawai negeri. Kepedulian masyarakat

merupakan salah satu dari bentuk partisipasi dalam peran serta masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungannya. Partisipasi masyarakat adalah hal yang utama untuk melihat sejauh mana kegiatan masyarakat dalam peran serta melakukan upaya pengelolaan kawasan konservasi sebagai dukungan terhadap penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Sorong.

Di perairan pesisir dan laut Kota Sorong sampai dengan saat ini masih berlaku adanya rezim open acces sehingga memunculkan praktik-praktik yang menyebabkan permasalahan baik terhadap sumberdaya wilayah pesisir dan laut maupun para penggunanya khususnya masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Agar tidak terjadi hal-hal tersebut maka perlu adanya KKP untuk wilayah perairan laut sehingga pengelolaannya menjadi kondusif, karena dalam rezim open access tersebut, masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat adat merupakan golongan masyarakat pesisir yang relatif rentan/lemah dalam berkompetisi untuk mengakses sumberdaya pesisir dan laut. Kelemahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan modal, teknologi, kemampuan sehingga cenderung rentan terhadap penguasaan maupun peminggiran oleh pemilik modal dan teknologi. Maka untuk itulah perlu membuat rencana penetapan KKP dengan mengkaji tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat, dan diharapkan pemerintah daerah dapat merespon rencana ini agar dapat terealisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat setempat mengenai kawasan konservasi perairan dan manfaatnya?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi perairan?
3. Bagaimana hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat dengan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi?
4. Bagaimana strategi pengembangan kawasan konservasi perairan di Kota Sorong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian:

1. Menganalisis persepsi masyarakat setempat mengenai kawasan konservasi perairan dan manfaatnya.
2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi perairan.
3. Menganalisis hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat dengan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi perairan.
4. Menghasilkan arahan Strategi pengembangan kawasan konservasi perairan di Kota Sorong.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis/akademis memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap manfaat dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

2. Manfaat praktis sebagai pertimbangan dan masukan kepada stakeholder, baik masyarakat maupun pemerintah dalam membuat program-program kegiatan yang mendukung kawasan konservasi perairan sesuai dengan keadaan sosial dan kearifan masyarakat setempat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kawasan Konservasi

Sasaran utama kawasan konservasi di pesisir dan lautan adalah untuk mengkonservasikan ekosistem dan sumberdaya alam sehingga proses-proses ekologis di suatu ekosistem dapat terus berlangsung dan dipertahankannya produksi bahan makanan dan jasa-jasa lingkungan bagi kepentingan manusia secara berkelanjutan.

Agardi (1997), tujuan penetapan kawasan konservasi yaitu: 1) melindungi habitat kritis, 2) mempertahankan keanekaragaman hayati, 3) mengkonservasikan sumberdaya ikan, 4) melindungi garis pantai, 5) melindungi lokasi-lokasi yang bernilai sejarah dan budaya, 6) menyediakan lokasi rekreasi dan pariwisata, 7) merekolonisasi lokasi yang tereksplorasi dan 8) mempromosikan pembangunan pesisir dan lautan berkelanjutan.

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan perwujudan dari pengembangan Struktur Tata Ruang yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah Kawasan Konservasi ini ditetapkan sebagai wilayah limitasi atau kendala bagi pengembangan Kawasan Pemanfaatan, selanjutnya dapat ditentukan Kawasan Pemanfaatan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Wilayah. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wilayah Kota Sorong, adalah : i). Hasil analisis kesesuaian lahan; ii). Kriteria Kawasan Konservasi menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1990. Kawasan Konservasi atau Kawasan Lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumberdaya alam serta sumberdaya buatan guna pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan Lindung meliputi flora dan fauna atau biota yang ada pada kawasan tersebut. Dalam hal ini Kawasan Lindung dapat terletak di darat dan perairan pesisir menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.

Kawasan Konservasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 dibedakan sebagai berikut:

- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K yang terdiri dari a) Suaka Pesisir; b) Suaka Pulau Kecil; c) Taman Pesisir; dan d) Taman Pulau Kecil.
- b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM, terdiri dari a) Daerah Perlindungan Adat Maritim; dan b) Daerah Perlindungan Budaya Maritim.
- c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP.
- d. Sempadan Pantai.

Berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, pengembangan kawasan konservasi perairan di Indonesia dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam Laut dan Suaka Margasatwa Laut dan Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri dari Taman Wisata Alam Laut dan Taman Nasional Laut. Kawasan konservasi ini telah diubah nomenklaturnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan yakni a) Taman Nasional Perairan; b) Suaka Alam Perairan; c) Taman Wisata Perairan; dan d) Suaka Perikanan. Kawasan Konservasi Perairan menurut Permen Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2009

adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

1. Taman Nasional Perairan

Tujuan pengelolaannya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.

Kriteria tertentu penetapan Taman Nasional Perairan sebagai berikut :

- a. Keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan.
- b. Memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan.
- c. Memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik.
- d. Memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien.
- e. Memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional.
- f. Secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara.
- g. Berada di wilayah lintas provinsi.
- h. Mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu.
- i. Potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.

2. Suaka Alam Perairan

Tujuan pengelolaannya untuk perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Kriteria tertentu penetapan Suaka Alam Perairan sebagai berikut :

- a. Memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami.
- b. Memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami.
- c. Memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.

3. Taman Wisata Perairan

Tujuan pengelolaannya untuk kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

Kriteria tertentu penetapan Taman Wisata Perairan sebagai berikut :

- a. Memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan.
- b. Memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien.
- c. Kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

4. Suaka Perikanan

Tujuan pengelolaannya sebagai daerah perlindungan sumber daya ikan tertentu.

Kriteria tertentu penetapan Suaka Perikanan sebagai berikut:

- a. Tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- b. Memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami.
- c. Memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.

1. Kawasan Perlindungan Setempat

Zona perlindungan setempat di pesisir laut Kota terbagi menjadi subzona sempadan sungai dan subzona sempadan pantai. Subzona sempadan sungai adalah zona sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sedangkan sempadan pantai adalah zona tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Zona ini harus dipertahankan keberadaannya untuk menjaga keberlangsungan fungsi pantai. Kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan sungai terdapat pada hampir semua distrik.

2. Kawasan Konservasi Mangrove

Luas hutan mangrove di Indonesia diperkirakan sekitar 3,5 juta hektar merupakan lahan mangrove terluas di dunia (18-23 persen), sementara data dari Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2010 (BPS, 2010) menyatakan Ekoregion Papua memiliki kawasan mangrove yang paling luas pada tahun 2007 yaitu 1,049,172.69 hektar. Pada periode tahun 1982-1987 terjadi penurunan luas mangrove dari 4,5 juta hektar antara tahun 1982-1987 menjadi 3,24 hektar dan

makin menyusut menjadi 2,5 juta hektar pada tahun 1993 (Dahuri 2001 dalam Karim, A. 2011).

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya dapat tumbuh dan berkembang baik pada daerah tropis, seperti Indonesia. Hutan ini memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), dan daerah pembesaran (*nursery ground*) berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan dan spesies lainnya. Selain itu serasah mangrove (berupa daun ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan perairan laut di depannya. Lebih jauh lagi hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah) bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia, dan jenis-jenis kehidupan lainnya, sehingga hutan mangrove menyediakan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan plasma nutfah (*genetic pool*) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan. Dengan sistem perakaran dan *canopy* yang rapat serta kokoh sehingga hutan mangrove juga memiliki fungsi sebagai pelindung daratan dari gempuran gelombang, tsunami, angin topan, perembesan air laut, dan gaya-gaya kelautan yang ganas lainnya.

3. Kawasan Rawan Bencana

Hampir seluruh wilayah Distrik pesisir Kota Sorong berada dalam kategori rawan bencana, dimana tercatat ada tiga jenis ancaman bencana yang potensial yaitu gempa, gelombang pasang/tsunami, angin kencang dan abrasi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa seluruh distrik berada dalam wilayah rawan bencana.

Berdasarkan letak geografis Wilayah Kota Sorong berada di kawasan Samudera Pasifik, dimana pada daerah ini terdapat Sesar Aktif (Sesar Sorong) dan Zona Penunjaman dan di Laut Seram juga terdapat Zona Penunjaman, sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan hampir keseluruhan wilayah pesisir Sorong sangat rentan terhadap terjadinya gempa dan tsunami. Berdasarkan kondisi geografis Kota Sorong yang dekat dengan perairan terbuka yakni di wilayah utara terdapat Samudera Pasifik dan di selatan Laut Seram dan data-data angin dari BMKG dan data Satelit Cersat menunjukkan bahwa wilayah yang berpotensi daerah yang terkena dampak akibat angin kencang yakni untuk Distrik Kota Sorong hampir semua Distrik pesisir yakni Distrik Sorong Barat, Sorong Kepulauan, dan Distrik Sorong Manoi, sedangkan untuk Distrik Sorong Timur relatif terlindung oleh pulau-pulau di perairan Selat Sele. Bencana abrasi merupakan proses pengikisan pantai, abrasi hanya mengenai garis pantai dari segmen pantai yang terabrasi. Laju abrasi yang terjadi menentukan berapa lebar lahan tepi pantai yang hilang terabrasi dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk jangka panjang, membicarakan masalah abrasi yang terjadi di suatu segmen pantai berarti membicarakan kemungkinan luas lahan pantai yang akan hilang pada suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, berbicara masalah abrasi untuk jangka panjang berarti membicarakan lahan pantai yang terancam hilang oleh abrasi. Data hasil analisis Mart Consultant (2009) dalam Tim POKJA Zonasi Kota Sorong (2012) menunjukkan bahwa wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya abrasi adalah wilayah pesisir Kota Sorong bagian utara (Distrik Sorong Utara), sebagian pulau-pulau kecil Distrik Sorong Kepulauan, dan Distrik Seget. Hasil analisis transpor sedimen menunjukkan arah sedimen yang bergerak ke utara jauh

lebih kecil dibandingkan ke selatan. Ini artinya pantai utara terjadi abrasi sedangkan di wilayah selatan terjadi sedimentasi. Dari hasil pemantauan lapangan menunjukkan wilayah pesisir Kota Sorong umumnya dibagian utara, pantai barat dan pulau-pulau kecil merupakan daerah rawan abrasi. Seperti pada Pulau Raam, dimana masyarakat di sana sangat merasakan dampak perubahan garis pantai yang dari tahun ke tahun semakin menipis dan mengancam pemukiman mereka.

B. Penetapan Kawasan Konservasi

Selain proses penetapan konservasi seperti yang diuraikan di atas, beberapa kawasan konservasi juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Kawasan konservasi ini tidak harus dilakukan dengan persetujuan pemerintah. Proses penentuannya juga tidak serumit dengan proses penentuan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penentuan kawasan konservasi oleh masyarakat didasarkan akan kebutuhan oleh masyarakat untuk melindungi sumberdaya atau lingkungannya. Pertimbangan utamanya adalah karena masyarakat memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.

Beberapa konflik kepentingan dalam penguasaan sumberdaya alam yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat pada beberapa tahun belakangan ini mengemuka sebagai isu. Pengertian konflik dalam sumberdaya alam khususnya di wilayah pesisir biasanya terkait dengan ketidaksetaraan distribusi akses terhadap sumberdaya dari berbagai pengguna (Gorre, 1999). Dalam konteks konservasi, konflik tersebut sering muncul kepermukaan dalam bentuk persaingan antara kepentingan pembangunan di satu pihak dan konservasi di pihak lain. Salah satu konsep konservasi yang banyak di terapkan di Indonesia *Integrated Conservation*

and Development Program (ICDP). Dalam penerapan konsep ini terjadi perkembangan kearah pembuatan kesepakatan formal antara pengelola kawasan konservasi (dalam hal ini pemerintah) dengan masyarakat. Kesepakatan tersebut pada prinsipnya mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam menggunakan sumberdaya alam kawasan.

Kriteria Tambahan dalam Penentuan Kawasan Konservasi

Salm dkk (2000), menyebutkan kriteria dasar penetapan kawasan konservasi terdiri atas kriteria ekologi, sosial dan ekonomi. Selanjutnya oleh Bengen (2002), bahwa Identifikasi dan pemilihan lokasi potensial untuk kawasan konservasi di pesisir dan laut menuntut penerapan kriteria yang berfungsi untuk mengkaji kelayakan suatu lokasi bagi kawasan konservasi.

Selain kriteria utama seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat kriteria tambahan yang sering menjadi pertimbangan dalam penetapan suatu kawasan, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek ekologi.

1. Kriteria Aspek Sosial

- a. **Penerimaan masyarakat:** hal ini dapat dinilai melalui tingkat dukungan masyarakat setempat, seperti dukungan masyarakat terhadap tradisi lokal yang sudah ada. Hal ini merupakan jaminan dalam keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut.
- b. **Kesehatan Masyarakat:** hal ini dapat dilihat dengan minimalnya tingkat pencemaran yang terjadi, walaupun status dari wilayah tersebut sudah tercemar maka ada pengawasan dan pelarangan dalam pencemaran. Hal ini secara langsung akan membuat kesehatan masyarakat membaik.

- c. Rekreasi; bila daerah tersebut akan dijadikan tempat wisata maka masyarakat setempat harus memanfaatkan potensi wisatanya dan tetap menjaga wilayah tersebut untuk kepentingan konservasi.
- d. Budaya; sejarah, artistik dan segala yang berkaitan dengan budaya masyarakat merupakan nilai yang penting dalam suatu kawasan.
- e. *Conflict of Interest*; bila suatu kawasan sudah ditentukan tujuannya maka masyarakat harus konsekuen dengan tujuan tersebut, seperti bila suatu kawasan diperuntukkan untuk wisata maka pemanfaatan harus dibatasi.
- f. Keamanan; hal ini berkaitan dengan kegiatan para wisatawan seperti kenyamanan dalam berenang, menyelam, snorkeling atau olah raga air. Para wisatawan sangat mengutamakan keamanan dalam mengunjungi suatu kawasan wisata.
- g. Kemudahan; adanya kemudahan dalam mengakses daerah tersebut baik lewat darat maupun laut. Para peneliti, pelajar maupun nelayan mempunyai akses terhadap wilayah tersebut dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar.
- h. Pendidikan; kawasan tersebut merupakan tempat yang tepat untuk pendidikan dan penelitian dan contoh perlindungan ekosistem alam yang baik.

2. Kriteria Aspek Ekonomi

- a. Pentingnya spesies tertentu; nilai ekonomis yang terkandung dalam sumberdaya seperti terumbu karang, rawa, mangrove dll. Karena spesies tersebut bernilai maka perlu pengelolaan untuk tetap menjaga stoknya.

- b. Pentingnya bagi nelayan; besarnya ketergantungan nelayan terhadap kawasan tersebut serta hasil perikanan. Hal ini memerlukan pengelolaan yang tepat untuk keberlanjutan sumber penghasilan bagi nelayan.
- c. Ancaman terhadap alam; pada kawasan ini terdapat kegiatan yang dapat atau telah merusak ekosistem alam seperti kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun maupun penggunaan pukat harimau.
- d. Keuntungan ekonomi; tingkatannya dapat dilihat pada dampak ekonomi yang diberikan kepada masyarakat setempat dalam jangka waktu lama bukan sebaliknya yaitu mengganggu kegiatan perekonomian setempat.
- e. Pariwisata; nilainya dapat diukur dari adanya potensi pengembangan wisata di daerah tersebut dan juga dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi.

3. Kriteria Aspek Ekologi

- a. Keanekaragaman (*diversity*); kriteria ini dapat diukur dari keanekaragaman atau kesuburan ekosistem, habitat, komunitas dan spesies.
- b. Alamiah; hal ini dapat diukur dari kondisi alamiah kawasan tersebut yang merupakan potensi wisata yang baik dan degradasi memberikan nilai yang kecil terhadap aspek wisata atau ekologi.
- c. Ketergantungan; dapat dilihat dari ketergantungan spesies terhadap habitatnya, dimana ekosistemnya sendiri tergantung pada proses ekologi dalam komunitas kawasan tersebut.
- d. Keterwakilan; kriteria ini dapat diukur dari keterwakilan tipe atau bentuk habitat, proses ekologi, komunitas biologi, fisiografi atau karakteristik alam.

- e. Keunikan; keunikan spesies yang hanya terapat di ekosistem tersebut merupakan nilai yang sangat berharga terutama bagi penelitian dan potensi wisata.
- f. Kesatuan; dapat dinilai dari fungsi kawasan tersebut yang merupakan kesatuanyang saling terkait bagi keberlanjutan sistem ekologi.
- g. Produktivitas; kriteria ini dapat diukur dari tingkat proses produktivitas kawasan tersebut dengan melihat hasil kontribusi yang diberikan terhadap spesies atau masyarakat sekitar kawasan tersebut.
- h. Kerawanan; kriteria ini dinilai dari tingkat kerawanan kawasan tersebut mengalami degradasi. Komunitas biotik dengan habitat lautnya mempunyai toleransi yang sangat lemah terhadap kondisi lingkungan bahkan dapat punah karena lemahnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Untuk mengoptimalkan upaya kawasan konservasi perairan, perlu dilakukan kegiatan perencanaan, yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumberdaya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologis setempat terhadap upaya penetapan KKP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta PERMEN Nomor 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penetapan kriteria di atas dilandasi asumsi bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tiga parameter pencapaian baik secara Ekonomi, Sosial budaya dan Ekologi. Kesejahteraan masyarakat dari parameter ekonomi tidak akan terwujud dalam jangka panjang jika kondisi sosial budaya tidak kondusif dan konsisi ekologi tidak lestari.

C. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah suatu proses dimana otak menerima gelombang informasi lingkungannya melalui organ penginderaan, ini berguna untuk memberikan pengertian kepada benda yang ada di lingkungannya. Persepsi adalah suatu mental yang rumit dan melibatkan berbagai kegiatan untuk menggolongkan stimulus yang masuk sehingga menghasilkan tanggapan untuk memahami stimulus tersebut. Persepsi dapat terbentuk setelah melalui berbagai kegiatan (Wibowo, 2003).

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses atas kesadaran seseorang dalam merespon rangsang yang diperhatikan, diterima, dipahami, evaluasi, pemaknaan dan prediksi secara subyektif (sesuai pengalaman masa lampaunya dan lingkungan) yang pada gilirannya menentukan perilaku (pemikiran perasaan, sikap, dan tindakan) seseorang.

Menurut Robin (1996), beberapa hal yang mempengaruhi persepsi :

1. Pelaku persepsi, bila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dan pelaku persepsi, antara lain sikap, motif, pengalaman masa lalu.
2. Target yang akan diamati, karakteristiknya dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan.
3. Situasi, yaitu unsur-unsur dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi persepsi.

Menurut Wirawan (1983), karena adanya faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang terhadap hal yang sama berbeda dengan persepsi orang lain. Selain itu persepsi juga menentukan lebih lanjut secara berbeda atas seseorang dengan yang lain, mengenai apa dan bagaimana yang akan mereka lakukan sebagai implikasinya.

Angel (dalam Murray & Lappin, dikutip dalam Nurdin, 2000 : 43) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat peranserta seseorang dalam mengikuti kegiatan lingkungannya, adalah sebagai berikut : (1) Umur, (2) Pekerjaan, (3) Penghasilan, (4) Pendidikan, dan (5) Lama tinggal. Dalam uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut, diterangkan bahwa; (a) individu dengan usia menengah ke atas cenderung untuk aktif berperanserta dalam kegiatan yang ada di lingkungannya; (b) individu dengan pekerjaan yang tetap cenderung untuk berperanserta; (c) individu dengan penghasilan makin tinggi makin berperanserta. Secara umum, bila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka ia cenderung untuk tidak berperanserta. Oleh karena itu, pekerjaan dan penghasilan merupakan faktor yang dapat menempatkan individu pada posisi atau kelas ekonomi tertentu dalam masyarakat, dan hal tersebut akan berperan dalam menentukan aktivitas yang diikuti individu. Hasil kajian yang berkaitan dengan tingkat persepsi seperti menurut Mardijono (2008) bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi laut Kota Batam tinggi akibat dari andil pemerintah yang terus menerus memberikan sosialisasi. Sedangkan Andante Nurida (2012) bahwa tingkat persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan juga dipengaruhi oleh lama tinggal dan pendidikan seperti yang dikaji pada

masyarakat disekitar pembangunan kawasan kawasan *seafront city* di Kabupaten Rembang

Saptorini (2003), persepsi dan partisipasi masyarakat cukup baik dalam pelaksanaan konservasi hutan mangrove di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sedangkan menurut Kaimuddin A. H. (2012) persepsi mayoritas masyarakat bahwa kondisi lingkungan sebelum dan sesudah penetapan Taman Nasional adalah sama seperti yang terjadi pada masyarakat di Taman Nasional Karimunjawa. Menurut Saragih, F. (2011) bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat cukup baik terhadap pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Provinsi Sumatera Utara karena memiliki cukup pendidikan dan lama berada di lokasi tersebut.

Menurut Suryaningsih, (2012) bahwa persepsi masyarakat cukup baik, dimana masyarakat mengetahui dan menganggap keberadaan hutan rakyat sangat penting, perlu dijaga dan dipertahankan. Masyarakat aktif dalam kegiatan-kegiatan hutan rakyat, kerjasama dengan instansi terkait, adanya peran aktif wanita dan adanya norma yang mengatur pelestarian lingkungan seperti upaya pelestarian hutan rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

D. Partisipasi Masyarakat

Peranserta atau partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi, kebijakan kegiatan, memikul beban, dan pelaksanaan kegiatan serta memetik hasil dan manfaat kegiatan secara berkeadilan (Tjokroamidjojo, 1977). Lebih lanjut Hardjosoemantri (1997) menyebutkan bahwa dengan adanya peranserta masyarakat, menyebabkan anggota masyarakat mempunyai

potensi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan dan mengusahakan keberhasilannya. Dengan pengertian lain, peranserta atau keterlibatan seseorang memungkinkan untuk menciptakan, menyelenggarakan serta memelihara lingkungan hidupnya dengan baik, sehingga lingkungan hidup terjamin kelestariannya. Partisipasi berarti memberikan sumbangan dalam taat menentukan arah dan tujuan pembangunan, dimana ditekankan bahwa partisipasi adalah hak dan kewajiban dari setiap masyarakat (Soetrisno, 1995 : 45-46).

Menurut Gultom (1985), partisipasi yang baik adalah yang mendukung suksesnya suatu program. Beberapa sifat dari partisipasi antara lain positif, kreatif, kritis, korektif, konstruktif, dan realistis, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Partisipasi dikatakan positif, bila partisipasi tersebut mendukung kelancaran usaha bersama dalam mencapai tujuan.
2. Partisipasi yang kreatif, berarti keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya ikut begitu saja suatu kegiatan yang direncanakan pihak lain, tidak hanya melaksanakan intruksi atasan, melainkan memikirkan sesuatu yang baru baik gagasan, metode maupun cara baru yang lebih efektif dan efisien.
3. Partisipasi dapat dikatakan kritis, korektif-konstruktif bila keterlibatan dilakukan dengan mengkaji suatu jenis atau bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan bila ada dan memberikan alternatif yang lebih baik.
4. Partisipasi yang realitas mempunyai arti bahwa keikutsertaan seseorang dengan memperhitungkan realitas atau kenyataan dalam masyarakat maupun realitas mengenai kemampuannya, waktunya yang tersedia dan adanya kesempatan dan keterampilan.

Menurut Sastroputro (1986), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah keadaan sosial masyarakat, kegiatan program pembangunan dan keadaan alam sekitar. Keadaan sosial masyarakat meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Kegiatan program pembangunan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah yang dapat berupa organisasi masyarakat dan tindakan kebijaksanaan. Sedangkan alam sekitar merupakan faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan masyarakat setempat. Tokoh masyarakat, pimpinan adat, tokoh agama adalah komponen yang juga berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

Menurut Suprayoga (1996) dalam Suparti (2008), dalam konservasi mangrove ada bermacam-macam cara untuk membentuk partisipasi masyarakat, mulai dari kegiatan non fisik yang meliputi pemberian informasi kepada pihak/instansi terkait mengenai daerah-daerah yang layak dikonservasi, yang dapat menjadi masukan dalam menentukan kebijakan dan perencanaan, pemberian informasi mengenai mangrove dan manfaatnya bagi masyarakat serta tehnik pengelolaannya, sampai kegiatan fisik yakni ikut serta melakukan kegiatan penyediaan benih mangrove, melakukan penanaman dan pemeliharaan benih-benih yang sudah ditanam.

Menurut Ndraha (1982), partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek akan berpengaruh terhadap keberhasilannya. Bila diterapkan dalam bidang pembangunan, partisipasi meliputi tiga hal pokok yaitu : (1) adanya keterlibatan seseorang yang berpartisipasi, (2) adanya ketersediaan dari

masyarakat untuk memberikan sumbangan materi, tenaga maupun pikiran untuk ikut dalam suatu kegiatan bersama demi mencapai tujuan dan, (3) adanya rasa tanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan seseorang.

Menurut Raharjo (1985) *dalam* Suparti (2008), suatu proyek kadang-kadang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, hal ini mungkin saja terjadi karena sejak semula masyarakat tidak ikut serta dalam perencanaan sehingga kurang sesuai dengan kebutuhannya dan selanjutnya masyarakat tidak dapat memanfaatkan dan memeliharanya.

Menurut Sustiwi (1986) *dalam* Suparti (2008), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi tiga tahapan, yakni (1) tahap perencanaan, biasanya diwakili oleh tokoh masyarakat atau wakil yang duduk di pemerintahan desa, (2) tahap pelaksanaan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan baik secara fisik maupun non fisik., (3) tahap pemantauan program, masyarakat berpartisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

Hasil penelitian yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat seperti menurut Sulistrianto (2009) bahwa Kawasan Konservasi seperti TN Karimunjawa yang dikelola dengan system zonasi partisipatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat berupa sikap proaktif dan spontan yaitu tindakan langsung maupun persuasive. Menurut Hapsari 2012, berkaitan dengan partisipasi masyarakat perikanan dalam pelestarian ekosistem mangrove di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah pendidikan dan lama tinggal. Sedangkan menurut Irianto H, (2002) bahwa konfigurasi dan pemanfaatan sungai

dan pemukiman tidak sesuai dengan tata kota sehingga menimbulkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk menjaga secara bersama-sama.

Siallagan (2012) menyatakan bahwa konsep partisipasi merupakan konsep yang dikembangkan oleh pemerintah dengan mengacu pada Permen PU No. 03/PRT/M/2009 dengan tingkat partisipasi berada pada tingkat konsultasi yang ditandai dengan terjalannya dialog dua arah pada pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan seperti dalam kegiatan konservasi sabuk hijau di kawasan waduk jatibarang, yang bertujuan untuk mengkaji konsep, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi sabuk emas.

Hardjasoemantri (1990:2-6) mengemukakan beberapa pokok pikiran yang melandasi peranserta masyarakat yaitu :

1. Memberi informasi kepada Pemerintah

Artinya peranserta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian Pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang perlu diperhatikan.

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga yang telah memperoleh kesempatan untuk berperanserta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peranserta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat.

3. Membantu perlindungan hukum

Apabila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatankeberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan itu berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan ke pengadilan, la7imnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu.

4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peranserta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan system perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa peranserta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penyampaian informasi atau saran kepada Pemerintah, melakukan pengawasan terhadap lingkungan, dan pengimplementasian kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditunjukkan bahwa dalam peranserta ada 3 (tiga) variabel utama yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- a. Keterlibatan pikiran dan perasaan yang lebih besar dari keterlibatan jasmani, dalam hal ini adalah persepsi masyarakat terhadap lingkungan;
- b. Kesiediaan memberikan bantuan atau kontribusi pada pencapaian tujuan kelompok sebagai refleksi rasa senang dan sukarela membantu, dalam hal ini adalah sikap masyarakat terhadap lingkungan;

- c. Terdapat tanggung jawab sebagai faktor yang sangat dominan dari rasa menjadi bagian dan kelompok sebagai manifestasi *sense of belonging and togetherness*, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

E.Strategi Perwujudan Kawasan Konservasi Perairan

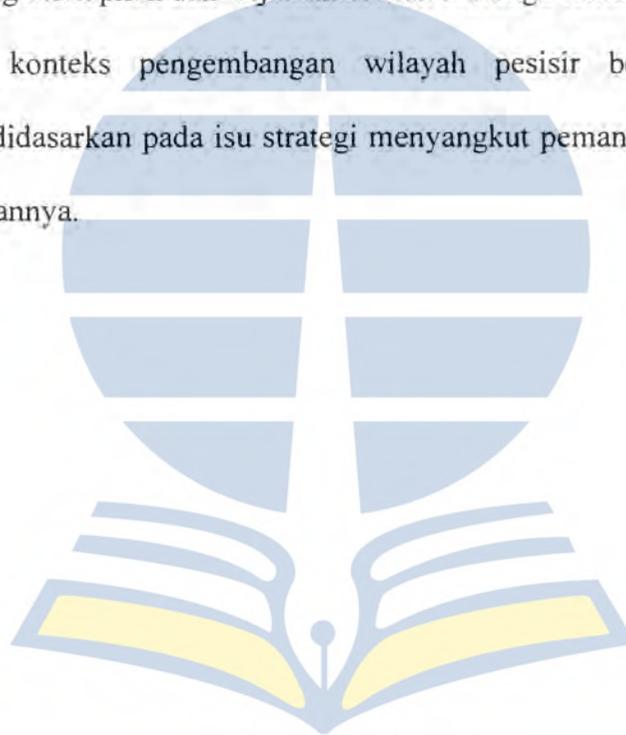
Pembangunan wilayah pesisir merupakan pembangunan yang dilakukan secara komprehensif dengan strategi dan kebijakan yang dapat diakomodir guna pencapaian manfaat yang optimal. Wilayah pesisir dan pantai memiliki arti strategis dalam hal pengembangan wilayah, karena merupakan wilayah interaksi antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, mengandung produksi biologi yang cukup besar serta adanya jasa-jasa lingkungan lainnya yang memberikan peluang penghidupan dan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dahuri dkk, (2001) mengemukakan tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia antara lain adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumberdaya wilayah pesisir dan lautan.
3. Peningkatan kemampuan peranserta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
4. Peningkatan pendidikan, latihan riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

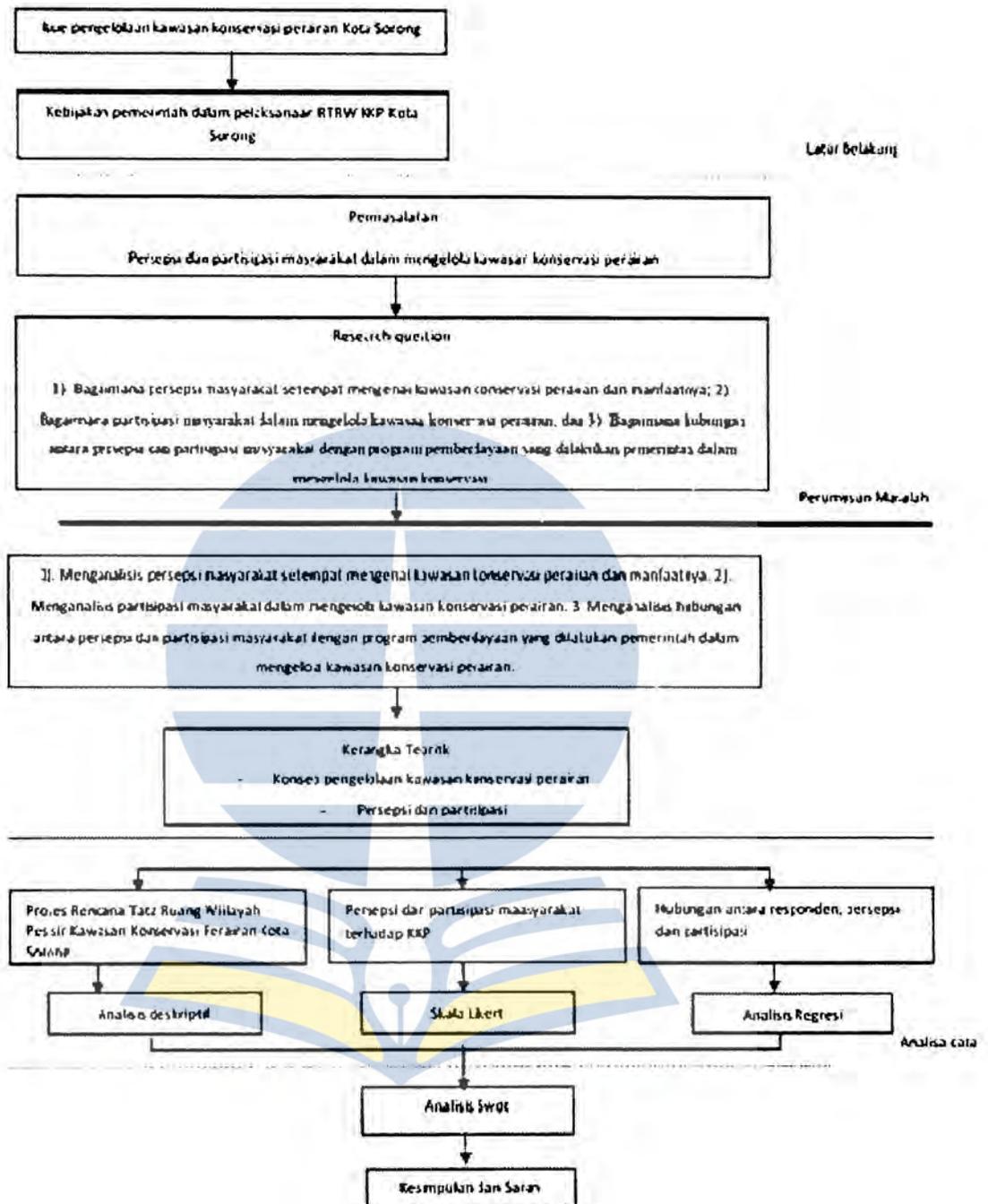
Selanjutnya oleh Dahuri dkk (2001), bahwa dari tujuan tersebut dijabarkan dalam pokok-pokok kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan meliputi :

(1) penegakan kedaulatan dan yuridiksi nasional; (2) mendayagunakan potensi laut dan dasar laut; (3) meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat nelayan; (4) mengembangkan potensi berbagai industri kelautan dan penyebarannya di seluruh wilayah tanah air; (5) memenuhi kebutuhan data dan informasi kelautan serta memadukan dan mengembangkannya dalam suatu jaringan sistem informasi; (6) mempertahankan dayadukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan pokok di lakukan dalam berbagai bentuk kebijakan operasional yang ditetapkan dan dijalankan oleh lembaga-lembaga terkait.

Dalam konteks pengembangan wilayah pesisir berbagai kebijakan pembangunan didasarkan pada isu strategi menyangkut pemanfaatan sumberdaya dan perlindungannya.



F. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kawasan konservasi perairan di Kota Sorong adalah metode survey. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang fakta dan gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual yang terjadi di lokasi penelitian. Metode penelitian memfokuskan kepada masyarakat yang berhubungan erat dengan konservasi perairan yaitu nelayan juga masyarakat lain seperti tokoh masyarakat yang berdomisili di lokasi penelitian, melalui wawancara langsung dengan daftar pertanyaan. Variabel yang diteliti adalah variabel tingkat persepsi dan partisipasi, kemudian dijabarkan secara deskriptif korelasi, yakni berusaha membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan faktual, mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Kemudian dari hasil yang didapatkan akan didesain suatu model perencanaan penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Sorong.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Bulan September – Oktober 2013, tempat penelitian di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Penelitian ini difokuskan pada lima lokasi yang merupakan kawasan pesisir. Kelima lokasi tersebut antara lain Pulau Raam, Pulau Soop, Kelurahan Klaligi, Kelurahan Remu Selatan dan Kelurahan Tanjung Kasuari.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat atau masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di lokasi penelitian yaitu di wilayah konservasi perairan (kawasan konservasi terumbu karang, kawasan konservasi mangrove, sempadan sungai dan kawasan mitigasi bencana). Jumlah responden yang diambil berdasarkan jumlah populasi penduduk yakni 10% dari jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah penelitian tersebut.

Jumlah penduduk Kelurahan Pulau Raam sebanyak 2630 jiwa dan jumlah responden di kelurahan ini berjumlah 31 orang atau sekitar 10 % dari jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan (338 org) yang berdomisili di kelurahan ini. Jumlah penduduk Kelurahan Pulau Soop sebanyak 1409 jiwa jumlah responden yang terpilih di kelurahan ini sebanyak 28 orang nelayan yang mewakili 296 nelayan, kedua kelurahan ini dipilih untuk mewakili responden di daerah kepulauan.

Sedangkan untuk Sorong daratan dipilih 3 lokasi yang mewakili daerah pesisir. Ketiga lokasi tersebut adalah Remu Selatan, Klaligi dan Saoka. Remu Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 26.560 jiwa responden yang diambil berjumlah 49 orang atau setara 10 % dari jumlah penduduk berprofesi sebagai nelayan (510 orang) yang bertempat tinggal di Kelurahan ini. Kelurahan Saoka umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan hand line (pancing) berjumlah penduduk sebanyak 1837 jiwa dan responden yang terpilih adalah sebanyak 45 orang atau setara dengan 10% dari 475 orang yang bermatapencaharian sebagai nelayan sedangkan kelurahan Klaligi umumnya adalah nelayan penjual hasil perikanan, jumlah penduduk di kelurahan ini sebanyak 17.052 dan jumlah

responden yang terpilih sebanyak 49 orang, diambil dari 620 orang yang beraktifitas di sekitar Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kota Sorong.

D. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrument antara lain :

1. Teknik observasi (pengamatan) : teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai potensi sumberdaya pesisir dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat yaitu:
 - a. Potensi sumberdaya alam dilokasi penelitian yang meliputi mangrove, terumbu karang dan kawasan sepadan sungai.
 - b. Potensi sumberdaya manusia dilokasi penelitian yang meliputi nelayan dan masyarakat yang mendiami kawasan pesisir.
 - c. Potensi sosial budaya dilokasi penelitian yang seperti, tingkat pendidikan, penghasilan, lama tinggal di lokasi dan umur responden.
2. Teknik interview (wawancara): teknik ini untuk mendapatkan data primer. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yakni wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan secara purposive dengan narasumber atau responden yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir dalam mengelola kawasan konservasi. Narasumber atau responden yang di wawancara yaitu:
 - a. Nelayan
 - b. Kepala kampung
 - c. Tokoh masyarakat

- d. Tokoh adat
- e. Pejabat DKP
- f. Kantor LH serta instansi terkait lainnya

Daftar isian wawancara dapat dilihat pada lampiran 1.

3. Kuesioner : Untuk mendapatkan data primer digunakan kuesioner sebagai alat untuk mengetahui pendapat masyarakat. Respondennya adalah masyarakat lokal, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Daftar isian kuisoner yang meliputi identitas responden, persepsi masyarat, partisipasi dan peran pemerintah dapat dilihat pada lampiran 1. Pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam pedoman wawancara ini dibuat berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir kota Sorong, terutama yang menjadi objek dalam penelitian ini.

E. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur yang akan dilakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Menentukan lokasi penelitian. Lokasi yang akan di lakukan sampling yaitu lokasi yang masuk dalam kawasan konservasi. Menurut data analisis Mark Consultant (2009) dalam Tim POKJA Zonasi Kota Sorong (2012) kawasan konservasi yang ada di kota sorong terdapat pada Kelurahan: Klaligi, Saoka, Soop, Raam dan Remu Selatan, Sebaran penduduk Kota Sorong berdasarkan distrik dan kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.3.
2. Setelah menentukan lokasi penelitian, kita menetapkan jumlah responden yang akan diwawancara, jumlah responden yang akan di wawancara berjumlah 10% dari jumlah penduduk pada setiap kelurahan dan responden pada institusi.

3. Bila kita telah menentukan jumlah responden dan narasumber yang akan kita wawancara maka kuisioner yang telah kita sediakan diedarkan kepada masyarakat yang berhubungan erat dengan kawasan konservasi, sampel yang akan diambil diberikan peluang yang sama bagi setiap masyarakat yang dipilih sebagai responden.

Data primer yang dikumpulkan meliputi tingkat persepsi, dan partisipasi nelayan dalam pelestarian lingkungan pantai di kawasan pesisir Kota Sorong :

1. Karakteristik sosial ekonomi responden, meliputi pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, tingkat pendapatan, kondisi rumah nelayan.
2. Persepsi sikap dan peranserta nelayan dalam pelestarian lingkungan pantai, meliputi keikutsertaan dalam penyuluhan, pemahaman terhadap peraturan perlindungan lingkungan, tindakan, kesediaan memelihara ekosistem terumbu karang dan mangrove, serta kepatuhannya terhadap perlindungan sumberdaya alam.
3. Tingkat Persepsi dan partisipasi nelayan dalam pelestarian lingkungan pantai, meliputi keikutsertaan dalam penyuluhan, pemahaman terhadap peraturan perlindungan lingkungan tindakan, kesediaan memelihara ekosistem terumbu karang dan mangrove serta kepatuhannya terhadap perlindungan sumberdaya alam.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur, hasil penelitian, maupun karya ilmiah terdahulu, peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder dihimpun dari Dinas Perikanan Kota Sorong, Bappeda Kota Sorong, Kantor BPS Kota Sorong, dan

instansi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi :

- a. Karakteristik wilayah perairan pantai kawasan Pesisir Kota Sorong.
- b. Luas dan kondisi ekosistem mangrove dan terumbu karang di perairan Kota Sorong.
- c. Pemanfaatan ekosistem terumbu karang dan mangrove dalam kaitannya dengan konservasi kawasan perairan Kota Sorong.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner masyarakat tentang persepsi dan partisipasi dianalisa dengan menghitung indeks persepsi dan partisipasi masyarakat dan menggolongkannya dalam kategori. Pengkategorian persepsi dan partisipasi dilakukan dengan memberikan nilai skor pada setiap alternatif jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan. Nilai skor yang digunakan untuk persepsi dan partisipasi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yaitu skala Likert (Sugiyono, 2006). Dengan skala Likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor, seperti dibawah ini:

No	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju/Sangat Tahu	4
2.	Setuju/Tahu	3
3.	Cukup Tahu	2
4.	Tidak Tahu	1

Dasar perhitungan kategori menggunakan interval kelas dengan rumus :

$$Int = \frac{X_n - X_1}{K}, \quad (\text{Spiegel and Stephen, 2002})$$

Keterangan :

Int : besarnya interval tingkat persepsi dan partisipasi

X_n : indeks persepsi maksimum

X_1 : indeks persepsi minimum

K : jumlah kategori

Untuk menggambarkan hubungan antara persepsi dan tingkat partisipasinya digunakan analisis distribusi frekuensi dengan tabulasi silang yang kemudian diuji dengan uji Chi Square (Mason dan Lind. 2003) dengan rumus sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum \left[\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \right]$$

Dimana : χ^2 = Chi square

f_o = besarnya frekuensi yang teramati pada kategori

f_e = besarnya frekuensi yang diharapkan ada kategori tertentu.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H_0 : tidak ada hubungan antara persepsi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kawasan konservasi
- H_1 : ada hubungan antara persepsi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kawasan konservasi

Kriteria penerimaan dan penolakan H_0 :

- Jika $X^2_{hitung} \leq X^2_{tabel}$ maka H_0 diterima
- Jika $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara variabel bebas (persepsi masyarakat) dengan variabel terikat (tingkat partisipasi) maka digunakan uji koefisien kontingensi dengan rumus Sudjana (1996):

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + n}}$$

dimana : C = koefisien kontingensi

X^2 = nilai X^2 hitung

n = jumlah responden

Nilai C berkisar antara 0-1,00 dan semakin besar nilai C berarti hubungan antara dua variabel makin erat. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien kontingensi digunakan batasan yang dikemukakan oleh Sugiono (2007) diuraikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. *The Value of Correlation Coefficients and Level of Relationship*

Rate Coefficient	Interval Relation
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1.00	Sangat kuat

Sumber : Sugiono (2007)

Untuk menganalisis perencanaan penetapan kawasan konservasi perairan Kota Sorong maka digunakan analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang melemahkan ancaman, maksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan. Variabel internal merupakan faktor yang dapat dikontrol karena berada dalam lingkungan perusahaan. Variabel internal meliputi kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*Weakness*), dimana kekuatan dan kelemahan tersebut merupakan analisis keunggulan strategis. Variabel eksternal merupakan faktor diluar jangkauan karena tidak dapat dikontrol. Variabel ini meliputi peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*). Wahyudi (1994) mendefinisikan konsep SWOT sebagai berikut :

1. *Strenghts* (kekuatan) adalah keunggulan sumberdaya, keterampilan dan kemampuan lainnya.
2. *Weakness* (kelemahan) adalah keterbatasan dalam sumberdaya, keterampilan dan kemampuan yang secara serius dapat menghalangi kegiatan.
3. *Opportunities* (peluang) adalah situasi utama yang menguntungkan lingkungan kegiatan.
4. *Threats* (ancaman) adalah situasi utama yang tidak menguntungkan lingkungan kegiatan.

Analisis SWOT dibuat dalam bentuk matriks. Ada empat strategi yang diperoleh dari matrik tersebut :

- a. Strategi SO : yaitu membuat strategi dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

- b. Strategi WO : yaitu membuat strategi dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
- c. Strategi ST : yaitu membuat strategi dengan cara menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- d. Strategi WT : yaitu membuat strategi dengan cara meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Gambaran Kota Sorong

A. Geografis dan Administratif

Kota Sorong merupakan salah satu bagian dari provinsi Papua Barat yang secara Geografis terletak pada koordinat $131^{\circ}51'$ BT dan $0^{\circ}54'$ LS dengan ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan suhu udara minimum $\pm 23,10^{\circ}\text{C}$ dan maksimum $\pm 33,70^{\circ}\text{C}$. Curah hujan tercatat 2.991 mm yang cukup merata sepanjang tahun. Luas wilayah Kota Sorong 1.105 Km² yang terdiri dari 6 Distrik dan 32 Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Dampir Kabupaten Raja Ampat
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong dan Selat Sagawin Kabupaten Raja Ampat.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Distrik Aimas dan Distrik Salawati Kabupaten Sorong

Letak Kota Sorong sangat strategis jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hal ini karena kota Sorong berada pada posisi paling Barat dan merupakan pintu masuk dari wilayah Indonesia bagian Barat ke Provinsi Papua Barat. Selain itu Kota Sorong juga merupakan persinggahan bagi pengunjung dan wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Utara dan arah Selatan ke kota/kabupaten lain serta ke ibu kota provinsi. Selain itu, Kota Sorong juga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Kota Sorong dapat dijangkau melalui berbagai sarana transportasi, baik darat, laut maupun

udara. Bandar Udara Dominie Eduward Osok (DEO) sendiri, Bandar Udara Kota Sorong, dapat di darati pesawat jenis Boeing 737 seri 200. Saat ini rute penerbangan dari dan ke Kota Sorong telah dilayani oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan yakni Merpati Airlines, Express Air, Pelita Air Service, Wings Air, Air Fast Indonesia, Deraya dan Travira. Dan untuk perhubungan laut telah tersedia 4 (empat) pelabuhan yang menghubungkan kota Sorong dengan daerah lainnya. Topografi Kota Sorong sangat bervariasi. Terdiri dari pegunungan, lereng, bukit bukit dan sebagian adalah dataran rendah. Sebelah timur di kelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata.

Kota Sorong memiliki 6 (enam) distrik. Jumlah distrik yang memiliki wilayah pesisir terdiri dari 5 (lima) Distrik yaitu; Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong kepulauan. Distrik yang tidak memiliki wilayah pesisir adalah Distrik Sorong Utara.



Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Sorong

NO	DISTRIK	LUAS WILAYAH TOTAL (KW)	KATEGORI DISTRIK
1	Sorong	126,85	Pesisir
2	Sorong Barat	254,15	Pesisir
3	Sorong Manoi	135,97	Pesisir
4	Sorong Timur	158,21	Pesisir
5	Sorong kepulauan	200,10	Pesisir
6	Sorong Utara	229,71	Daratan Utama
	Total	1.105,00	

Sumber : BPS Kota Sorong 2011

Wilayah perencanaan Zonasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Kota Sorong adalah wilayah dari distrik pesisir dengan luas kawasan kawasan $\pm 875,28$ km² atau sekitar 79,21 persen dari luas seluruh wilayah administratif Kota Sorong, dengan garis pantai sepanjang ± 43 km yang didalamnya terdapat 6 buah pulau kecil (BAPPEDA Kota Sorong, 2011). Distrik yang termasuk dalam kategori distrik pesisir adalah : Distrik Sorong, Sorong Barat, Sorong Manoi, Sorong Timur dan Distrik Sorong kepulauan. Dari 5 wilayah distrik pesisir, terdapat 16 Kelurahan Pesisir.

Tabel.4.2 Wilayah Distrik dan Kelurahan Pesisir Kota Sorong

No	Distrik Pesisir	No	Kelurahan Pesisir
1	Sorong Barat	1	Klawasi
		2	Saoka
		3	Tanjung Kasuari
		4	Rufei
2	Sorong Manoi	5	Malawei
		6	Klaligi
		7	Klasabi
		8	Remu Selatan
3	Sorong Timur	9	Klawalu
		10	Klablim
4	Sorong	11	Klasuur
		12	Kampung Baru
5	Sorong Kepulauan	13	Raam
		14	Soop
		15	Doom Barat
		16	Doom Timur

Sumber : Bappeda Kota Sorong 2011

B.Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Sorong sebesar 190.625 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 99.920 jiwa dan Perempuan 90.705 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,80 %. Laju ini relatif tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan penduduk provinsi Papua Barat (sebesar 3,71 %). Jumlah rumah tangga berdasarkan data statistik tahun 2010 terhitung 42.375 rumah tangga (Kota Sorong dalam Angka 2011). Penduduk Kota Sorong bersifat heterogen yang terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli terdiri dari suku Moi, Suku Maybat, Suku Inanwatan. Penduduk pendatang berasal dari rumpun suku Jawa, Batak, Makassar, Buton, Ambon, Manado dan sebagainya (BAPPEDA Kota Sorong, 2011). Sebaran penduduk di Kota Sorong berdasar Distrik adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Sebaran Penduduk Kota Sorong berdasarkan Distrik dan Kelurahan

No.	Distrik/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sorong			
	Remu Utara	8840	8840	17680
	Malawei	13287	11853	25140
	Klademak	7688	7388	15076
	Klaligi	9198	7854	17052
	Kamp. Baru	8254	7773	16027
2	Sorong Barat			
	Saoka	1004	833	1837
	Tanjung Kasuari	1625	1396	3021
	Klawesi	7586	6936	14522
	Rufei	9111	8154	17265
	Klabala	7433	6630	14063
3	Sorong Utara			
	Klagate	8375	7957	16332
	Malanu	4343	3092	7435
	Matalamagi	5874	5061	10935
	Klawuyuk	9790	8318	18108
4	Sorong Timur			
	Remu Selatan	14233	12327	26560
	Malaingkeci	9488	9137	18625
	Klasaman	9315	8307	17622
	Klabin	1383	1205	2588

	Sorong Kepulauan			
5	Dum Barat	2557	2244	4801
	Dum Timur	3698	3327	7025
	Soop	730	679	1409
	Raam	1399	1231	2630
	T o t a l	145211	130542	275753

Sumber: Data Capil Desember 2011, dalam Dokumen Bappeda 2011

C. Kawasan Konservasi Kota Sorong

Penetapan Kawasan konservasi merupakan perwujudan dari pengembangan Struktur Tata Ruang yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan Konservasi ini ditetapkan sebagai wilayah limitasi atau kendala bagi pengembangan kawasan Pemanfaatan, selanjutnya dapat ditentukan kawasan Pemanfaatan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil wilayah. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk Penetapan kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir laut dan pulau kecil wilayah Kota Sorong, adalah : i). Hasil analisis kesesuaian lahan; ii). Kriteria Kawasan Konservasi menurut Kepres No 32 Tahun 1990. Kawasan Konservasi atau kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumberdaya alam serta sumber daya buatan guna pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan lindung meliputi flora dan fauna atau biota yang ada pada kawasan tersebut. Dalam hal ini kawasan lindung dapat terletak di darat dan perairan pesisir menurut Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Berdasarkan hasil identifikasi

kriteria kawasan konservasi ditinjau dari fungsinya, maka kawasan konservasi di pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Kota Sorong di dasarkan pada :

- a. Wilayah Pesisir meliputi :
 - Zona perlindungan setempat, terdiri atas : sempadan pantai, dan sungai;
 - Zona Rawan Bencana, antara lain berupa Rawan Banjir;Rawan Abrasi, dan Rawan Gelombang Tinggi;
 - Zona Kawasan suaka alam dan cagar budaya, terdiri atas Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; taman wisata alam, suaka alam laut dan perairan lainnya, dan pantai berhutan bakau.
- b. Wilayah laut akan mencakup zona Taman Nasional Perairan (termasuk KKLD) dan Taman Wisata Perairan;

D. Kawasan Perlindungan Setempat

Zona perlindungan setempat di pesisir laut Kota terbagi menjadi subzona sempadan sungai dan subzona sempadan pantai. Subzona sempadan sungai adalah zona sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.Sedangkan sempadan pantai adalah zona tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Zona ini harus di pertahankan keberadaannya untuk menjaga keberlangsungan fungsi pantai.

Kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan sungai terdapat pada hampir semua distrik . Kawasan Sempadan Sungai di distrik pesisir Kota Sorong terdapat seluas 652.55 hektar sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel .4.4 Sepadan Sungai di Kota Sorong Berdasarkan Distrik

NO	DISTRIK	SEPADAN SUNGAI (Ha)
1.	Sorong	68.16
2.	Sorong Barat	33.56
3.	Sorong Manoi	550.84
4.	Sorong Timur	-
5.	Sorong Kepulauan	-
	Total	652.55

Sumber : Hasil Analisis tim Perencana 2012

E. Kawasan Konservasi Mangrove

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya dapat tumbuh dan berkembang baik pada daerah tropis, seperti Indonesia. Hutan ini memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), dan daerah pembesaran (*nursery ground*) berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan dan spesies lainnya. Selain itu serasah mangrove (berupa daun ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan perairan laut di depannya. Lebih jauh lagi hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah) bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia, dan jenis-jenis kehidupan lainnya, sehingga hutan mangrove menyediakan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan plasma nutfah (*genetic pool*) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan. Dengan sistem perakaran dan *canopy* yang rapat serta kokoh sehingga hutan mangrove juga memiliki fungsi sebagai pelindung daratan dari gempuran

gelombang, tsunami, angin topan, perembesan air laut, dan gaya-gaya kelautan yang ganas lainnya. Komposisi dan struktur jenis mangrove di Kota Sorong bervariasi bergantung pada tingkat ketinggian lumpur dan jangkauan pengaruh pasang surut air laut. Jumlah jenis mangrove yang dijumpai berkisar antara 7-12 jenis dengan zonasi relatif jelas untuk tipe mangrove muara, yaitu *Avicenia sp* dan *Sonneratia sp* merupakan zonasi terluar selanjutnya ke arah dalam diikuti oleh *Rhizophora sp* dan *Bruquiera sp* serta *Nypha fruticans sp* dan *Xylocarpus sp*. Hasil analisa data ekosistem Mangrove dan analisa citra/penginderaan jauh digunakan untuk menentukan kawasan konservasi mangrove Kota Sorong dengan mengacu pada kriteria penentuan kawasan konservasi mangrove.

Sebaran Mangrove di Kota Sorong berdasarkan interpretasi citra terdapat di dua titik besar yaitu Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Kepulauan dengan total luasan sebesar 1,651.91 hektar.

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan parameter yang di uji, selanjutnya dilakukan *scoring* dan pembobotan untuk menghasilkan nilai kelayakan untuk kawasan konservasi. Kisaran nilai kesesuaian untuk penentuan kawasan konservasi mangrove di kawasan mangrove Kota Sorong dapat dibagi menjadi 3 klas yaitu tidak sesuai (Skor 1), kurang sesuai (skor 2) dan sesuai (skor 3). Berdasarkan hasil *scoring* dan analisis citra Alos 2012. Berikut disajikan data luasan perencanaan kawasan konservasi Mangrove per Distrik.

Tabel 4.5 Luasan kesesuaian untuk Kawasan Konservasi Mangrove di Kota Sorong

NO	DISTRIK	LUASAN MANGROVE (%)
1.	Sorong	
2.	Sorong Barat	
3.	Sorong Manoi	187.33 11.34
4.	Sorong Timur	1278.03 77.36
5.	Sorong Kepulauan	186.55 11.29
	Total	1651.91 100

Sumber : Hasil Analisis tim Perencana 2012

Luasan terbesar untuk perencanaan konservasi Mangrove terdapat di Distrik Sorong Timur, Sorong Manoi dan Sorong Kepulauan dengan luasan masing-masing 1278.03, 187.33 dan 186.55 hektar. Jika di perbandingkan dengan seluruh luasan wilayah konservasi seluas 15,510.60 hektar maka zona konservasi hutan mangrove ini terhitung 10.65 persen dari total seluruh luasan. Perhitungan kawasan konservasi mangrove telah mencakup seluruh rencana perlindungan sempadan pantai.

Berdasarkan hasil analisis citra alos, juga di dapatkan nilai kelayakan perlindungan dan rehabilitasi untuk kawasan terumbu karang. Kawasan terumbu karang ini dengan total luas 108.74 hektar dengan masing-masing untuk konservasi seluas 61.95 hektar atau seluas 56.97 % dari total luasan dan untuk rehabilitasi terumbu seluas 46.79 hektar atau senilai 43.03 %. Nilai luasan per distrik untuk kategori konservasi terdapat di Distrik Sorong Barat dan Sorong Kepulauan dengan luasan masing-masing 35.85 hektar dan 72.89 hektar.

Kategori rehabilitasi di defenisikan kepada sumberdaya terumbu yang telah rusak, sedangkan konservasi pada sumberdaya yang terancam keberadaanya khususnya pada aktivitas manusia dan atau keadaan alam. Melihat besarnya luasan terumbu yang telah rusak dan dihubungkan dengan perilaku penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil, maka di anggap perlu untuk melakukan upaya program konservasi dan rehabilitasi kondisi terumbu karang yang terstruktur dan partisipatif melalui model Kawasan Konservasi Laut Daerah.

F. Kawasan Rawan Bencana

Hampir seluruh wilayah Distrik pesisir Kota Sorong berada dalam kategori rawan bencana, dimana tercatat ada tiga jenis ancaman bencana yang potensial yaitu gempa, gelombang pasang/Tsunami, Angin Kencang dan abrasi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa seluruh distrik berada dalam wilayah rawan bencana. Berdasarkan letak geografis Wilayah Kota Sorong berada di kawasan Samudera Pasifik, di mana pada daerah ini terdapat Sesar Aktif (Sesar Sorong) dan Zona Penunjaman dan di Laut Seram juga terdapat Zona Penunjaman, sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan hampir keseluruhan wilayah pesisir Sorong sangat rentan terhadap terjadinya gempa dan tsunami. Berdasarkan kondisi geografis Kota Sorong yang dekat dengan perairan terbuka yakni di wilayah utara terdapat Samudera Pasifik dan di selatan Laut Seram dan data-data angin dari BMKG dan data satelit Cersat menunjukkan bahwa wilayah yang berpotensi daerah yang terkena dampak akibat angin kencang yakni untuk Distrik Kota Sorong hampir semua Distrik pesisir yakni Distrik Sorong Barat, Sorong Kepulauan, dan Distrik Sorong Manoi, sedangkan untuk Distrik Sorong Timur

relative terlindung oleh pulau-pulau di perairan Selat Sele. Bencana abrasi merupakan proses pengikisan pantai, abrasi hanya mengenai garis pantai dari segmen pantai yang terabrasi. Laju abrasi yang terjadi menentukan berapa lebar lahan tepi pantai yang hilang terabrasi dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk jangka panjang, membicarakan masalah abrasi yang terjadi di suatu segmen pantai berarti membicarakan kemungkinan luas lahan pantai yang akan hilang pada suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, berbicara masalah abrasi untuk jangka panjang berarti membicarakan lahan pantai yang terancam hilang oleh abrasi.

Data hasil analisis Mart Consultant 2009 menunjukkan bahwa wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya abrasi adalah wilayah pesisir Kota Sorong bagian utara (Distrik Sorong Utara), sebagian pulau-pulau kecil Distrik Sorong Kepulauan, dan Distrik Seget. Hasil analisis transpor sedimen menunjukkan arah sedimen yang bergerak ke utara jauh lebih kecil dibandingkan ke Selatan. Ini artinya pantai utara terjadi abrasi sedangkan di wilayah Selatan terjadi sedimentasi. Dari hasil pemantauan lapangan menunjukkan wilayah pesisir Kota Sorong umumnya dibagian Utara, pantai Barat dan pulau-pulau kecil merupakan daerah rawan abrasi. Seperti pada Pulau Raam, dimana masyarakat di sana sangat merasakan dampak perubahan garis pantai yang dari tahun ke tahun semakin menipis dan mengancam pemukiman mereka.

Dengan adanya ancaman sebagaimana dikemukakan oleh Mart Consultant (2009) tersebut terhadap wilayah pesisir kota Sorong, maka kami sangat mengharapkan adanya Strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi perairan pesisir Kota Sorong. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan penetapan kawasan konservasi perairan (KKP) yang berbasis masyarakat.

Penetapan KKP ini meliputi penetapan Zona Konservasi dan pengembangannya untuk Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya serta memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya. Dan perlu juga ditetapkan Zona Sempadan Pantai untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dan melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, yang merupakan kawasan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Selain itu perlu Pengaturan kawasan permukiman pesisir diarahkan berada dibelakang daerah sempadan pantai serta dilarang berkembang ke arah zona konservasi dan preservasi. Dengan demikian zona-zona tertentu akan lebih terjaga eksistensi, peran dan fungsinya, baik secara ekologi maupun ekonomi.

Pengembangan kawasan konservasi perairan ini sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, sebab masyarakat sekitar merupakan pengguna sumberdaya yang secara langsung berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan tersebut. Seberapapun besarnya upaya penyelamatan lingkungan yang dilakukan pemerintah, akan menjadi sia-sia jika tidak ada dukungan dari masyarakat di wilayah tersebut.

Masyarakat harus merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumberdaya secara berkelanjutan. Maka untuk mencapai tujuan ini

diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dan budaya yang optimal dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ditujukan untuk mendukung kelestarian sumberdaya pesisir di kawasan ini. Karena peran serta masyarakat pada kegiatan penetapan dan pengembangan kawasan konservasi sangat berarti bagi keberlanjutannya. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa keberhasilan upaya pengembangan kawasan konservasi perairan tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, tetapi sejauh mana masyarakat sekitar terlibat dalam kegiatan tersebut, tentunya akan sangat menguntungkan jika kawasan ini lebih dikenal oleh masyarakat dan masyarakat merasa memiliki.

B. Persepsi Masyarakat

Hasil tanggapan masyarakat yang disampaikan melalui jawaban dari pertanyaan terstruktur dalam kuesioner yang terdiri dari 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu masyarakat Kelurahan Pulau Raam, Kelurahan Pulau Soop, Kelurahan Remu selatan, Kelurahan Klaligi dan Kelurahan Saoka (Tanjung Kasuari), yang masing – masing responden berbeda jumlahnya tergantung dari besarnya populasi jumlah penduduk yang didasarkan pada mata pencaharian (terutama nelayan).

Rencana penetapan kawasan konservasi didasarkan atas beberapa indikator antara lain kondisi kawasan, indikator sosial, indikator ekonomi dan indikator ekologi. Hasil jawaban yang dihimpun dari pertanyaan seputar persepsi masyarakat tentang kondisi kawasan terutama pada kondisi hutan mangrove (Tabel 4.6) dan sungai (Tabel 4.7

Tabel 4.6 Persepsi Masyarakat Mengenai Kondisi Hutan Mangrove

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	0	18	11	2	0.00	58.06	35.48	6.45
2	Pulau Soop	0	22	6	0	0.00	78.57	21.43	0.00
3	Remu Selatan	0	0	19	30	0.00	0.00	38.78	61.22
4	Klaligi	0	0	38	10	0.00	0.00	79.17	20.83
5	Saoka	0	0	30	15	0.00	0.00	66.67	33.33
Rata -rata						0.00	27.33	48.30	24.37

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Kondisi Mangrove Sangat Baik

Nilai 3, Kondisi Mangrove Baik

Nilai 2, Kondisi Mangrove Rusak

Nilai 1, Kondisi Mangrove Sangat rusak

Tabel 4.7 Persepsi Masyarakat Mengenai Kondisi Sungai

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	0	22	9	0	0.00	70.97	29.03	0.00
2	Pulau Soop	0	26	2	0	0.00	92.86	7.14	0.00
3	Remu Selatan	0	0	20	29	0.00	0.00	40.82	59.18
4	Klaligi	0	0	41	7	0.00	0.00	85.42	14.58
5	Saoka	0	10	33	2	0.00	22.22	73.33	4.44
Rata -rata						0.00	37.21	47.15	15.64

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Kondisi Sungai Sangat Baik

Nilai 3, Kondisi Sungai Baik

Nilai 2, Kondisi Sungai Rusak

Nilai 1, Kondisi Sungai Sangat rusak

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa rata-rata 27.33% persepsi responden menyatakan kondisi mangrove “baik”; 48,3 % persepsi responden menyatakan kondisi mangrove “rusak” dan 24,37% persepsi responden menyatakan kondisi mangrove “sangat rusak”; sehingga dapat dikatakan bahwa hutan mangrove di pesisir kota Sorong telah mengalami kerusakan, terutama yang berada di kawasan Sorong Daratan sedangkan untuk Sorong Kepulauan Soop (78,57 %) dan Raam (58,06 %) responden mengatakan masih tergolong baik. Sedangkan kondisi sungai (Tabel 7) rata-rata 47,15% responden mengatakan kondisi sungai “rusak” kecuali untuk kelurahan P. Soop dan P. Raam, untuk kelurahan klaligi 85 % responden mengatakan kondisi sungai rusak sedangkan menurut 59.18 % responden di kelurahan Remu Selatan mengatakan bahwa kondisi sungai di kelurahan ini sangat rusak (kategori 1). Lebih lanjut responden mengatakan bahwa rusaknya sungai di kota Sorong ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat sendiri tentang kesehatan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut pada bulan Oktober 2013 di Kota Sorong telah digelar Ekspose Kualitas Sungai Remu Kota Sorong dan Sungai Kohoin Kabupaten Sorong Selatan oleh Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Papua Barat, dihadiri SKPD terkait lingkup Pemkot Sorong dan Pemkab Sorsel. Kepala Laboratorium Unipa Manokwari, Jackson F. Morin menjelaskan, hasil penelitian

dan analisis lapangan yang dilakukan pihaknya, di beberapa titik-titik tertentu di bagian hilir sungai Remu sudah tercemar berat khususnya di HBM, jembatan Polresta dan Jalan Baru. Dijelaskannya, hasil analisis pada 3 lokasi tersebut, dari 20 parameter yang diuji, hampir 50 persen sudah diambang lokomutu batas lingkungan. Terkait tercemarnya sungai remu ini, solusi yang akan diambil, alangkah baiknya pinggiran atau daerah sempadan sungai Remu, ditanami pohon-pohon seperti bambu dan jenis tanaman lainnya yang dapat meminimalkan terjadinya erosi. Jackson F. Morin lebih jauh menjelaskan bahwa di sungai Remu ada parameter kimia yang perlu diadakan pengolahan khusus sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Khusus untuk mikro organismenya dengan tingkat ekoly yang juga perlu mendapat pengolahan khusus. Selain itu, ada beberapa parameternya seperti kandungan besi, tembaga dan ada 2 faktor utama yang menjadi penentu peningkatan parameter, yang disebabkan karena limbah domestic atau home industry, juga dari pekerjaan perbengkelan yang limbahnya dibuang ke sungai. Kemudian yang kedua, struktur geologi sungai Remu bisa saja logam sudah ada dalam struktur biologi sungai.

Diungkapkannya, di bagian atas sebelum lokasi PDAM, kandungan tembaga dan besi sudah diatas lokomutu. Kandungan tembaga dan besi ini berasal dari struktur geologi yang memiliki kandungan mineral yang tinggi . Namun ketika melewati daerah HBM dan Polres dan juga Jalan Baru, mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini disebabkan adanya kontak gempasan air dari luar air sungai atau diluar badan sungai. Selain itu juga adanya pembuangan limbah, dapat melalui pembuangan minyak atau oli bekas dan sebagainya. Sementara itu Plh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Kelly Kambu

saat ditemui menjelaskan bahwa sebenarnya mengatasi pencemaran sungai Remu, dari awal pihaknya sudah melaksanakan program dan mengecek keluarga yang berdomisili di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Remu. Dengan kondisi sungai Remu saat ini yang sudah tercemar berat mulai dari muara sungai sampai di HBM, dan sudah pada titik pantau yang berwarna hitam, karena itu harus segera diatasi dengan cara membuat sebuah forum komunikasi DAS Remu akan melibatkan semua warga atau RT yang berdomisili di sepanjang DAS Remu. (Radar Sorong, Oktober 2013)

Kerusakan hutan mangrove umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebagian dapat juga terjadi secara alami, yaitu pengaruh iklim global. Kegiatan penambangan hutan mangrove merupakan aktifitas masyarakat yang sering dilakukan di wilayah pesisir. Penambangan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya digunakan untuk kepentingan pembangunan perumahan, dan tiang bendera serta umbul-umbul. Menurut Aksornkoe, 1993 saat ini di seluruh dunia terjadi peningkatan hilangnya sumberdaya mangrove yang disebabkan adanya pemanfaatan yang tidak berkelanjutan serta pengalihan peruntukan. Kegiatan penambangan hutan mangrove dapat menyebabkan peningkatan erosi pantai dan berbagai kerusakan pantai lainnya. Hal ini disebabkan hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai penahan gelombang. Penambangan mangrove ini merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup sumberdaya perikanan terutama pada ekosistem hutan mangrove.

Kegiatan pembangunan utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap menurunnya luas areal mangrove di Indonesia adalah pengambilan kayu

untuk keperluan komersial serta peralihan peruntukan untuk tambak dan areal pertanian (khususnya padi dan kelapa). Pada tahun 1990, luas areal tambak yang terpantau sekitar 269.000 hektar (Ditjen Perikanan, 1991), yang kemudian meningkat menjadi 750.000 hektar pada tahun 2002/2003 (Baplan, 2005). Sementara itu, data tahun 1985 menunjukkan seluas 877.200 hektar areal mangrove berada dalam konsesi perusahaan hutan untuk diambil kayunya (Dep. Kehutanan & FAG, 1990).

Meskipun kondisi mangrove yang secara umum mengalami kerusakan namun Secara umum masyarakat nelayan sadar arti pentingnya keberadaan mangrove sebagai tempat asuhan bagi berbagai jenis biota laut dimana apabila wilayah dengan mangrove yang masih baik maka akan terdapat hasil tangkapan yang baik seperti udang, kepiting serta hasil perikanan lainnya. Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Sasekumar, dkk, 1992 dan Burhanuddin, 1993 bahwa produk yang paling memiliki nilai ekonomis tinggi dari ekosistem mangrove adalah perikanan pesisir. Banyak jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi menghabiskan sebagian siklus hidupnya pada habitat mangrove seperti. Kakap (*Lates calcacifer*), kepiting mangrove (*Scylla serrata*) serta ikan salmon (*Polynemus sheridani*) merupakan jenis ikan yang secara langsung bergantung kepada habitat mangrove (Griffin, 1985). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Unar dalam Djamali, (1991) beberapa jenis udang penaeid di Indonesia sangat tergantung pada ekosistem mangrove. Martosubroto & Naamin (dalam Djamali, 1991) mengemukakan adanya hubungan linier positif antara luas hutan mangrove dengan produksi udang,

dimana makin luas hutan mangrove makin tinggi produksi udangnya dan sebaliknya.

Salah satu kriteria tentang penetapan kawasan konservasi adalah potensi sumberdaya kawasan tersebut. Kajian tentang potensi mangrove, sepadan sungai dan terumbu karang Kota Sorong untuk mengetahui potensi sumberdaya tersebut, sehingga masih bisa/tidak jika ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan (KKP) sebagaimana hasil kajian Tim Perencana 2012 di kota Sorong ada beberapa lokasi yang dapat dijadikan sebagai kawasan antara lain Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Kepulauan sebagai kawasan konservasi hutan mangrove dengan total luasan sebesar 1,651.91 hektar. Sedangkan Kawasan konservasi terumbu karang dengan total luas 108.74 hektar dengan masing-masing untuk konservasi seluas 61.95 hektar atau seluas 56.97 % dari total luasan dan untuk rehabilitasi terumbu seluas 46.79 hektar atau senilai 43.03 %. Nilai luasan per distrik untuk kategori konservasi terdapat di Distrik Sorong Barat dan Sorong Kepulauan dengan luasan masing-masing 35.85 hektar dan 72.89 hektar.

Sesuai dengan peraturan terbaru dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008, model kawasan konservasi KKLD sudah tidak berlaku, perubahan nomenklatur menjadi KKP3K (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Upaya pelestarian potensi sumber daya tidak dapat dilaksanakan secara sepihak saja oleh pemerintah, melainkan perlu kerjasama dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu perlu diketahui persepsi responden mengenai potensi sumberdaya yang ada di Kota Sorong. Untuk jelasnya persepsi responden terhadap upaya pelestarian potensi sumberdaya mangrove dan sungai dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8 Persepsi masyarakat tentang potensi kawasan sungai dan mangrove yang akan dijadikan sebagai kawasan konservasi

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	0	11	17	3	0.00	35.48	54.84	9.68
2	Pulau Soop	0	21	7	0	0.00	75.00	25.00	0.00
3	Remu Selatan	0	0	23	26	0.00	0.00	46.94	53.06
4	Klaligi	0	0	36	12	0.00	0.00	75.00	25.00
5	Saoka	0	16	29	0	0.00	35.56	64.44	0.00
Rata -rata						0.00	29.21	53.24	17.55

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Potensi Mangrove dan sungai Sangat tinggi

Nilai 3, Potensi Mangrove dan sungai tinggi

Nilai 2, Potensi Mangrove dan sungai rendah

Nilai 1, Potensi Mangrove dan sungai sangat rendah

Dari Tabel 4.8 Terlihat bahwa rata-rata 29% responden menyatakan bahwa potensi mangrove dan sungai di Kota Sorong masih “tinggi”; 53% responden menyatakan potensi mangrove dan sungai rendah dan 17,55 % responden menyatakan persepsi bahwa potensi mangrove dan sungai sangat rendah.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air bersih pun akan semakin meningkat. Kendala utama upaya penyediaan air bersih di Kota Sorong adalah adanya keterbatasan sumber air yang tersedia, dan mempunyai ketergantungan pada besar-kecilnya debit air sungai-sungai sebagai intake air bersih (Tabel 4.9). Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk Kota Sorong

saat ini sebagian besar berasal dari pemanfaatan sumber air Sungai Remu. Sementara hasil penelitian Kepala Laboratorium Unipa Manokwari, Jackson F. Morin tahun 2013, melaporkan bahwa hasil penelitian dan analisis lapangan yang dilakukan pihaknya, di beberapa titik-titik tertentu di bagian hilir sungai Remu sudah tercemar berat khususnya di HBM, jembatan Polresta dan Jalan Baru. Dijelaskannya, hasil analisis pada 3 lokasi tersebut, dari 20 parameter yang diuji, hampir 50 persen sudah diambang lokomutu batas lingkungan (Radar Sorong, 2013).

Tabel 4.9 Potensi beberapa sungai sebagai sumber Air Baku di Kota Sorong

Nama Sumber Air	Debit Air (liter/detik)	
	Desain	Eksisting
Sungai Remu	140	110,83
Mata Air Malanu I	5	4
Mata Air Malanu II	10	7
Intake Malanu III	15	8
Intake Rufei I	5	3
Intake Rufei II	10	4
Jumlah	185	136,83

Sumber : PDAM Kota Sorong

Adanya keterbatasan sumber air ini menuntut perlunya dicari alternatif lokasi lain yang dapat dijadikan sebagai catchment area / waduk guna dapat menampung air sungai. Penampungan sumber air baku di Kota Sorong dapat dilakukan pula dengan membendung Sungai Remu sebelah hulu (Sungai Biru) untuk dijadikan sebagai waduk.

Kondisi hutan mangrove sampai saat ini mengalami tekanan-tekanan akibat pemanfaatan dan pengelolaan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian. Tuntutan pembangunan yang lebih menekankan pada tujuan ekonomi

dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik seperti konversi hutan mangrove untuk pembangunan kota-kota pantai (pemukiman), perluasan tambak dan lahan pertanian serta adanya penebangan liar tidak sesuai dengan peruntukannya dan melampaui daya dukungnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem mangrove dan degradasi lingkungan pantai. Kondisi ini diperberat dengan terjadinya pencemaran air sungai/air laut dan eksploitasi sumberdaya laut yang tidak ramah lingkungan. Indikasi adanya degradasi hutan mangrove masih berlangsung pada hampir semua wilayah pantai. Secara umum hal ini disebabkan oleh adanya peraturan perundangan serta penegakan hukum yang juga masih kurang tegas. Di samping itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan perlindungan hutan mangrove belum tumbuh sebagai akibat dari kurangnya intensitas penyuluhan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas kelembagaan.

Mengingat kawasan mangrove yang terdapat di daerah pasang surut sepanjang pantai atau muara sungai tersebut sangat rentan terhadap kerusakan serta mengingat pentingnya keberadaan kawasan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pantai, maka sumberdaya alam tersebut perlu ditata dan dikelola sesuai dengan sifat dan karakteristiknya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, social dan ekologi. Semua ini agar fungsi hutan mangrove dapat berjalan secara optimal dan dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Salah satu upaya untuk menata dan mengelola kawasan mangrove tersebut adalah dalam bentuk rehabilitasi hutan mangrove.

Menurut Eirnsstein (1969), tiga tangga teratas, kemitraan, pendelegasian wewenang dan pengawasan masyarakat, dikategorikan sebagai tingkat

"kekuasaan masyarakat" (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itulah kami sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam rencana penetapan kawasan konservasi Perairan. Dari hasil skoring persepsi masyarakat tentang perlu tidaknya masyarakat dilibatkan dalam penetapan Kawasan Konservasi perairan, tersaji pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Persepsi masyarakat tentang keterlibatannya dalam penyusunan RTRW KKP di Kota Sorong

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	1	12	18	0	3.23	38.71	58.06	0.00
2	Pulau Soop	9	19	0	0	32.14	67.86	0.00	0.00
3	Remu Selatan	2	28	19	0	4.08	57.14	38.78	0.00
4	Klaligi	0	29	19	0	0.00	60.42	39.58	0.00
5	Saoka	4	38	2	1	8.89	84.44	4.44	2.22
	Rata -rata					9.67	61.71	28.17	0.44

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, keterlibatan masyarakat sangat perlu

Nilai 3, keterlibatan masyarakat perlu

Nilai 2, keterlibatan masyarakat kurang perlu

Nilai 1, keterlibatan masyarakat tidak perlu

Dari hasil skoring terlihat bahwa rata-rata 9,6% persepsi masyarakat sangat perlu untuk dilibatkan dalam penyusunan RTRW KKP; 61,71 % persepsi masyarakat merasa perlu dilibatkan dan 28,17% persepsi responden merasa kurang perlu dilibatkan. Terkait dengan perencanaan KKP, responden menyadari

bahwa perlu keterlibatan mereka dalam pengelolaan KKP mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, serta perlunya melibatkan institusi Perguruan Tinggi atau mitra ilmiah lainnya terutama bidang penelitian, investarisasi dan pemantauan terhadap habitat dan populasi yang terancam punah maupun untuk menangani isu-isu penting di dalam pengelolaan KKP.

Peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemahaman Kawasan Konservasi Perairan Kota Sorong ditujukan untuk mendukung rencana penetapan kawasan konservasi perairan di kota ini. Karenanya peran serta masyarakat harus dilibatkan pada kegiatan rencana penetapan dan pengembangan kawasan konservasi. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa keberhasilan upaya penetapan kawasan konservasi perairan tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, tetapi sejauh mana masyarakat sekitar terlibat dalam kegiatan tersebut. tentunya akan sangat menguntungkan jika kawasan ini lebih dikenal oleh masyarakat.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang antara lain UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, PP No 69 Tahun 1996 serta Permendagri No 9 Tahun 1999, di kemukakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan kegiatan penataan ruang mulai dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karenanya kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut di Kota Sorong ini akan menekankan keterbukaan sehingga memungkinkan bagi masyarakat

untuk melaksanakan haknya, yaitu memberikan informasi, data, tanggapan atau pendapat keberatan.

Hasil jawaban yang dihimpun dari pertanyaan seputar persepsi masyarakat tentang peraturan Kawasan Konservasi, pada sub pertanyaan tentang pengetahuan dan keberadaan Daerah konservasi tersaji pada Tabel 4.11. Dan pentingnya kawasan konservasi tersaji pada Tabel 4.12.

Tabel 4.11 Persepsi masyarakat tentang aturan kawasan konservasi

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	0	0	7	24	0.00	0.00	22.58	77.42
2	Pulau Soop	0	0	19	9	0.00	0.00	67.86	32.14
3	Remu Selatan	2	31	16	0	4.08	63.27	32.65	0.00
4	Klaligi	0	0	8	40	0.00	0.00	16.67	83.33
5	Saoka	0	2	8	35	0.00	4.44	17.78	77.78
	Rata -rata					0.82	13.54	31.51	54.13

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Persepsi Masyarakat Sangat Tahu tentang Kawasan Konservasi

Nilai 3, Persepsi Masyarakat Tahu tentang Kawasan Konservasi

Nilai 2, Persepsi Masyarakat Cukup Tahu tentang Kawasan Konservasi

Nilai 1, Persepsi Masyarakat Tidak Tahu tentang Kawasan Konservasi

Bedasarkan tabel 4.11, rata-rata presentase responden yang tidak mengetahui tentang peraturan konservasi sebesar 54.13%, sedangkan rata-rata

presentase masyarakat yang tahu tentang konservasi hanya 0.8%. Hal ini menunjukan bahwa sosialisasi tentang kawasan konservasi sangat minim. Padahal sudah cukup banyak Peraturan Pemerintah yang di luncurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan persepsi masyarakat tentang pentingnya kawasan konservasi setelah dijelaskan pada saat pengambilan data di lapangan menunjukan bahwa masyarakat sangat memahami akan pentingnya kawasan konservasi sebagaimana tersaji pada tabel 4.12.

Tabel 4.12 Persepsi masyarakat tentang pentingnya kawasan konservasi

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	10	9	5	7	32.26	29.03	16.13	22.58
2	Pulau Soop	11	17	0	0	39.29	60.71	0.00	0.00
3	Remu Selatan	27	18	4	0	55.10	36.73	8.16	0.00
4	Klaligi	14	34	0	0	29.17	70.83	0.00	0.00
5	Saoka	17	26	2	0	37.78	57.78	4.44	0.00
	Rata -rata					38.72	51.02	5.75	4.52

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Persepsi Masyarakat bahwa Kawasan Konservasi Sangat penting

Nilai 3, Persepsi Masyarakat bahwa Kawasan Konservasi penting

Nilai 2, Persepsi Masyarakat bahwa Kawasan Konservasi cukup penting

Nilai 1, Persepsi Masyarakat bahwa Kawasan Konservasi tidak penting

Dari hasil kuesioner tentang manfaat kawasan konservasi didapatkan bahwa rata – rata 45,17 % responden mengetahui bahwa kawasan konservasi sangat penting untuk nelayan dan 52,31 % responden mengetahui bahwa kawasan konservasi itu penting untuk semua lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan mereka telah memahami arti pentingnya mangrove sebagai rumah ikan (daerah pembesaran dan daerah mencari makan) sehingga apabila hutan mangrove rusak maka ikannya banyak sekali yang berkurang.

Hasil jawaban yang dihimpun dari pertanyaan seputar persepsi masyarakat tentang Kawasan Konservasi, pada sub pertanyaan mengenai perwujudan kawasan konservasi di perairan Kota Sorong dapat dilihat pada Tabel 4.13. Dari Tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa rata-rata 37,36 % responden sangat menginginkan konservasi, 26,54 % dan 27,89 % tidak perlu untuk penetapan kawasan konservasi di perairan Kota Sorong, bervariasi jawaban tentang penetapan kawasan konservasi ini disebabkan karena pada umumnya masyarakat menyadari tingginya pencemaran dan rusaknya hutan mangrove yang ada di pesisir Kota Sorong. Selain itu tingkat lalu lalang kapal di perairan ini cukup padat. Sehingga sebagian masyarakat ragu akan keberhasilan penetapan kawasan konservasi (hasil wawancara pribadi)

Tabel 4.13 Persepsi masyarakat tentang perlu ditetapkan kawasan konservasi

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	15	8	7	1	48.39	25.81	22.58	3.23
2	Pulau Soop	0	11	17	0	0.00	39.29	60.71	0.00
3	Remu Selatan	27	14	8	0	55.10	28.57	16.33	0.00
4	Klaligi	40	7	1	0	83.33	14.58	2.08	0.00
5	Saoka	0	11	17	0	0.00	24.44	37.78	0.00
	Rata -rata					37.36	26.54	27.90	0.65

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Persepsi Masyarakat bahwa Kawasan Konservasi sangat

perlu

Nilai 3, Persepsi Masyarakat bahwa Kawasan Konservasi cukup

perlu

Nilai 2, Persepsi Masyarakat bahwa Kawasan Konservasi perlu

Nilai 1, Persepsi Masyarakat bahwa Kawasan Konservasi tidak

perlu

Berdasarkan hasil rekapan kuesioner terhadap indikator sosial masyarakat dalam rencana penetapan kawasan mengrove di kota Sorong, dari 201 responden yang diwawancara pada lima lokasi penelitian didapatkan bahwa rata-rata 53,19 % responden sangat mendukung 35% cukup mendukung dan 11,14% kurang mendukung rencana penetapan kawasan konservasi (Tabel 4.14)

Tabel 4.14 Dukungan masyarakat terhadap keberadaan atau rencana penetapan kawasan konservasi

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	14	15	2	0	45.16	48.39	6.45	0.00
2	Pulau Soop	14	8	6	0	50.00	28.57	21.43	0.00
3	Remu Selatan	27	22	0	0	55.10	44.90	0.00	0.00
4	Klaligi	30	10	8	0	62.50	20.83	16.67	0.00
5	Saoka	29	15	1	0	66.67	22.22	17.78	0.00
	Rata-rata					53.19	35.67	11.14	0.00

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Persepsi Masyarakat sangat mendukung

Nilai 3, Persepsi Masyarakat cukup mendukung

Nilai 2, Persepsi Masyarakat kurang mendukung

Nilai 1, Persepsi Masyarakat tidak mendukung

Walaupun 53,19% dari responden mendukung penetapan kawasan konservasi ada beberapa faktor yang dapat memberi ancaman terhadap kelangsungan pengembangan kawasan konservasi yakni : kurangnya sosialisasi dari pemerintah, perubahan cara pandang masyarakat, adanya kompetensi lahan, cara pemanfaatan dan pengelolaan lahan (pembukaan lahan mangrove sebagai kawasan hunian masyarakat) yang tidak sesuai, serta transportasi baik transportasi darat maupun laut.

C. Partisipasi Masyarakat

Kategori partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi laut dan daratan di wilayah Kelurahan Pulau Raam, Pulau Soop, Remu Selatan, Saoka dan Klaligi dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu yang berpartisipasi sangat aktif dengan skor 4, berpartisipasi aktif dengan skor 3, berpartisipasi tingkat sedang dengan skor 2, dan tidak berpartisipasi dengan skor 1.

Dari hasil rekapan kuesioner jawaban yang dihimpun dari pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, pada sub pertanyaan tentang partisipasi masyarakat mengenai pemanfaatan mangrove tersaji pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	1	0	11	19	3.23	0.00	35.48	61.29
2	Pulau Soop	13	0	15	0	46.43	0.00	53.57	0.00
3	Remu Selatan	0	0	19	30	0.00	0.00	38.78	61.22
4	Klaligi	0	0	3	45	0.00	0.00	6.25	93.75
5	Saoka	1	1	14	29	2.27	2.27	31.82	65.91
	Rata –rata					10.39	0.45	33.18	56.43

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Menanam

Nilai 3, Tidak Menebang

Nilai 2, Mengambil Secara Beraturan

Nilai 1, Mengambil Secara tidak Beraturan

Hasil analisa menunjukkan bahwa dari kelima lokasi pengambilan data hanya Kelurahan Pulau Soop melakukan penanaman mangrove, sedangkan keempat lokasi lainnya yakni P. Raam, Remu Selatan, Klaligi dan Saoka melakukan penebangan mangrove secara tidak beraturan, dari Tabel 4.15 terlihat bahwa rata-rata nilai partisipasi penanaman mangrove adalah 56,43 % pernyataan masyarakat bahwa mereka mengambil mangrove secara tidak beraturan, hal ini berarti bahwa masyarakat di pesisir Kota Sorong sangat tidak berpartisipasi dalam mempertahankan kelestarian hutan mangrove. Hal ini akan berpengaruh pada kelestarian sumberdaya pesisir terutama pada ekosistem hutan mangrove.

Akibat maraknya aksi perambahan hutan Mangrove yang tak terjamah oleh hukum serta semakin gencarnya pembuatan tambak alam yang mengorbankan penebangan hutan bakau serta perambahan lahan konservasi di sekitar kawasan Pesisir Kota Sorong, Meski sudah ada legislasi tentang penegakan hukum lingkungan, namun upaya penegakan hukumnya masih normatif. Indonesia telah memiliki pedoman legal untuk perlindungan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah UU No. 23/1997 telah mengamanatkan pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu, Ketetapan MPR No. 17/MPR/1998 tentang HAM, dalam Bab Deklarasi Nasional juga memuat persoalan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Demikian juga dengan UU 39/1999 tentang HAM yang menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam UU tersebut, HAM menjamin adanya kebebasan manusia di bawah bagian hak untuk hidup atau *right to live*.

Hasil jawaban yang dihimpun dari pertanyaan seputar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, pada sub pertanyaan tentang

partisipasi masyarakat mengenai eksploitasi hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 4.16. Dari table 4.16 terlihat bahwa cukup tinggi tingkat eksploitasi terhadap hutan mangrove, terutama di kawasan pesisir Sorong daratan. Sebagian besar responden mengetahui tentang eksploitasi mangrove terutama untuk kebutuhan bangunan dan kayu api (kayu bakar).

Tabel 4.16 Partisipasi masyarakat dalam eksploitasi hutan mangrove

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	1	8	12	10	3.23	25.81	38.71	32.26
2	Pulau Soop	16	12	0	0	57.14	42.86	0.00	0.00
3	Remu Selatan	0	0	32	17	0.00	0.00	65.31	34.69
4	Klaligi	0	0	8	40	0.00	0.00	16.67	83.33
5	Saoka	0	1	32	12	0.00	2.27	72.73	27.27
	Rata –rata					12.07	14.19	38.68	35.51

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Tidak Mengambil/Menggangu mangrove

Nilai 3, Menggunakan mangrove, sebagai tiang umbul-umbul

Nilai 2, Mengambil mangrove untuk kayu bakar

Nilai 1, Mengambil mangrove Untuk Kegiatan Pembangunan

Hasil jawaban yang dihimpun dari pertanyaan seputar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, pada sub pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah untuk konservasi lingkungan tersaji dalam Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Partisipasi masyarakat dalam musyawarah lingkungan

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	0	0	13	18	0.00	0.00	41.94	58.06
2	Pulau Soop	0	16	12	0	0.00	57.14	42.86	0.00
3	Remu Selatan	0	23	26	0	0.00	46.94	53.06	0.00
4	Klaligi	0	0	0	48	0.00	0.00	0.00	100.00
5	Saoka	0	1	9	35	0.00	2.27	20.45	79.55
	Rata –rata					0.00	21.27	31.66	47.52

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Masyarakat berpartisipasi sangat aktif

Nilai 3, Masyarakat berpartisipasi aktif

Nilai 2, Masyarakat berpartisipasi kurang aktif

Nilai 1, Masyarakat berpartisipasi tidak aktif

Responden tidak berpartisipasi secara aktif dalam musyawarah konservasi lingkungan rata - rata 47,52 %, hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan lingkungan pesisir terutama hutan mangrove. Bahkan kelurahan klaligi 100% masyarakatnya tidak berpartisipasi aktif.

Lebih lanjut keterangan lain dari responden kerusakan hutan mangrove justru banyak diakibatkan oleh masyarakat yang bukan nelayan, mereka melakukan penebangan mangrove tanpa memperdulikan keseimbangan ekosistem lingkungan. Pemanfaatan kayu bakau oleh masyarakat nelayan dalam wilayah pesisir daratan Kota Sorong digunakan untuk berbagai keperluan seperti tiang rumah, tonggak untuk pengecoran bangunan bertingkat dan juga sebagai tiang bendera (umbul-umbul) pada saat perayaan hari besar dan nasional. Hal ini sempat

terjadi perselisihan diantara warga yang mengerjakan kegiatan dengan warga yang tidak setuju pengambilan mangrove sebagai bahan bangunan karena bisa menyebabkan kerusakan hutan mangrove serta bisa menyebabkan terjadinya abrasi pantai. Selanjutnya perselisihan tersebut diselesaikan dengan musyawarah antar warga perangkat kelurahan serta pihak Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian yang menghasilkan kesepakatan bahwa pengambilan mangrove dibolehkan hanya pada lokasi pengambilan yang sudah ditentukan dengan jumlah yang wajar. (wawancara dengan pak lurah Kelurahan Remu Selatan)

Percobaan penanaman bakau secara spontan oleh masyarakat kelurahan P. Soop pernah dilakukan pada tahun 2010 tetapi tidak berhasil karena pengetahuan masyarakat tentang penanaman mangrove belum mereka kuasai terutama tentang tekstur lahan, jenis mangrove, musim tanam yang tepat serta tehnik penanaman yang baik.

Percobaan penanaman bakau juga pernah dilakukan di Kelurahan Remu Selatan oleh kelompok masyarakat pada tahun 2011, hal ini dilakukan karena terjadi abrasi di bagian selatan pulau diakibatkan sudah berkurangnya pohon bakau sebagai penahan gelombang karena lokasi tersebut digunakan untuk pembangunan rumah warga.

Dari rekapan kuesioner tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman mangrove dapat dilihat pada Tabel 4.18. Dari Tabel 4.18 terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam penanaman mangrove rata-rata 42,27 % masyarakat kurang aktif dalam penanaman mangrove, walaupun masyarakat menyadari akan arti pentingnya ekosistem mangrove pada sumberdaya perairan.

Tabel 4.18 Partisipasi masyarakat dalam penanaman mangrove

No	Lokasi Penelitian	Skore				Presentase (%)			
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Pulau Raam	0	0	13	18	0.00	0.00	41.94	58.06
2	Pulau Soop	0	14	14	0	0.00	50.00	50.00	0.00
3	Remu Selatan	0	7	34	8	0.00	14.29	69.39	16.33
4	Klaligi	0	0	0	48	0.00	0.00	0.00	100.00
5	Saoka	4	13	23	5	9.09	29.55	52.27	11.36
	Rata –rata					1.82	18.77	42.72	37.15

Sumber : Data primer diolah, 2013

Keterangan : Nilai 4, Masyarakat berpartisipasi sangat aktif
 Nilai 3, Masyarakat berpartisipasi aktif
 Nilai 2, Masyarakat berpartisipasi kurang aktif
 Nilai 1, Masyarakat berpartisipasi tidak aktif

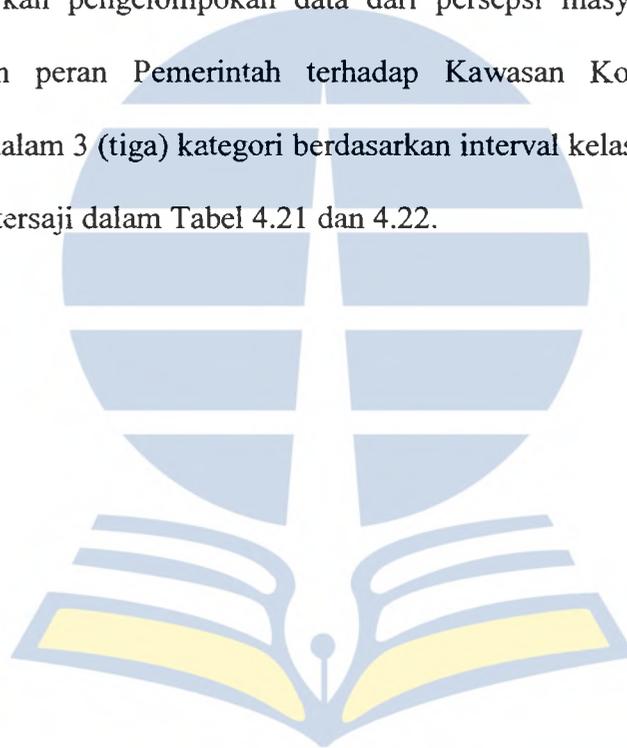
D. Peranan Pemerintah

Hasil skoring dari pertanyaan seputar peran pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Konservasi di wilayah Pulau Raam, pernyataan responden mencapai nilai 371 atau setara dengan 49,9 % bahwa pemerintah berperan kurang aktif dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, demikian juga responden di kelurahan Saoka 412 atau setara dengan 38,1 % dan Klaligi mencapai total nilai 506 atau setara dengan 43,9%, total nilai ini masuk dalam kategori peran pemerintah tingkat sedang dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, sedangkan untuk kelurahan Remu Selatan 57,6 % dan Kelurahan Pulau Soop 64,6 %, hasil

didapatkan bahwa selama ini pemerintah belum pernah melakukan penanaman mangrove di kawasan KKLD sedangkan untuk pengawasan hutan mangrove menurut responden peran pemerintah sangat kurang, sehingga sering terjadi penebangan liar/penyalahgunaan mangrove dan kawasan hutan mangrove.

E. Hubungan Persepsi, Partisipasi dan Peran Pemerintah terhadap Penentuan Kawasan Konservasi Perairan

Berdasarkan pengelompokan data dari persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat dan peran Pemerintah terhadap Kawasan Konservasi Perairan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan interval kelas dari hasil skoring total nilai yang tersaji dalam Tabel 4.21 dan 4.22.



Tabel 4.21 Kategori Persepsi dan Partisipasi Masyarakat (Nelayan) dalam penetapan Kawasan Konservasi

No.	Wilayah	Tingkat		Interval
1	Kelurahan Pulau Raam	3	Tinggi	837 - 1116
		2	Sedang	558 - 837
		1	Rendah	279 - 558
2	Kelurahan Pulau Soop	3	Tinggi	756 - 1008
		2	Sedang	504 - 756
		1	rendah	252 - 504
3	Kelurahan Remu Selatan	3	Tinggi	1323 - 1764
		2	Sedang	882 - 1323
		1	rendah	441 - 882
4	Kelurahan Klaligi	3	Tinggi	1296 - 1728
		2	Sedang	864 - 1296
		1	rendah	432 - 864
5	Kelurahan Saoka	3	Tinggi	1215 - 1620
		2	Sedang	810 - 1215
		1	rendah	405 - 810

Sumber : Data primer diolah, 2013

Tabel 4.22. Kategori Peran Pemerintah dalam penentuan Kawasan Konservasi

No.	Wilayah	Tingkat		Interval
1	Kelurahan Pulau Raam	3	Tinggi	558-744
		2	Sedang	372 - 558
		1	rendah	186 - 372
2	Kelurahan Pulau Soop	3	Tinggi	504 - 672
		2	Sedang	336 - 504
		1	rendah	168 - 336
3	Kelurahan Remu Selatan	3	Tinggi	882 - 1176
		2	Sedang	588 - 882
		1	rendah	294 - 588
4	Kelurahan Klaligi	3	Tinggi	864 - 1248
		2	Sedang	576 - 864
		1	rendah	288 - 576
5	Kelurahan Saoka	3	Tinggi	810 - 1080
		2	Sedang	540 - 810
		1	rendah	270 - 540

Sumber : Data primer diolah, 2013

Berdasarkan rekapan dan olahan data kuesioner tentang skor persepsi, partisipasi dan peran pemerintah dalam Penetapan Kawasan Konservasi, total nilai skoringnya disajikan dalam Tabel 23, Lampiran 2a, 2b dan 2c.

Peran pemerintah dalam penetapan Kawasan konservasi pada Kelurahan Pulau Raam, Pulau Soop, dan Remu Selatan tergolong pada tingkat peran “sedang” (54,3 % - 64,58 %) sedangkan pada kelurahan Saoka dan Klaligi

tergolong “rendah” sebagaimana yang tersaji di Tabel 4.23. dan Lampiran 2c, karena responden menilai peran pemerintah khususnya dalam penebangan mangrove tinggi, dan pentingnya sosialisasi kawasan konservasi dan RTRW KKP di Kota Sorong sangat kurang. Dengan rendahnya persepsi dan partisipasi masyarakat nelayan terhadap kinerja pemerintah maka dapat diindikasikan bahwa penetapan kawasan konservasi di Kota Sorong akan mengalami hambatan bahkan akan gagal.



Tabel 4.23 Total Skore Persepsi, Partisipasi dan Peran Pemerintah dalam Penetapan Kawasan Konservasi

No.	Wilayah	Kelompok	Total Skore	Tingkat	
1	Kelurahan Pulau Raam	Persepsi Masyarakat	651	2	Sedang
		Peran Masyarakat	432	1	Rendah
		Peran Pemerintah	404	2	Sedang
2	Kelurahan Pulau Soop	Persepsi Masyarakat	630	2	Sedang
		Peran Masyarakat	655	2	Sedang
		Peran Pemerintah	434	2	Sedang
3	Kelurahan Remu Selatan	Persepsi Masyarakat	1094	2	Sedang
		Peran Masyarakat	990	2	Sedang
		Peran Pemerintah	677	2	Sedang
4	Kelurahan Klaligi	Persepsi Masyarakat	975	2	Sedang
		Peran Masyarakat	772	1	Rendah
		Peran Pemerintah	506	1	Rendah
5	Kelurahan Saoka	Persepsi Masyarakat	997	2	Sedang
		Peran Masyarakat	870	2	Sedang
		Peran Pemerintah	412	1	Rendah

Sumber : Data primer diolah, 2013

Kurangnya optimal melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan penetapan kawasan konservasi di kelurahan, akan memunculkan kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut berakibat rendahnya kepedulian masyarakat itu sendiri pada perencanaan penetapan kawasan konservasi oleh pemerintah, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya

tingkat pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terbukti dengan rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penetapan kawasan konservasi, karena tanpa disadari sebenarnya peranan pemerintah masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik, akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keleluasaan bagi masyarakat secara optimal.

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove. Selanjutnya masyarakat perlu diberikan bimbingan dan penyuluhan tentang arti pentingnya hutan mangrove pada kehidupan ini terutama kehidupan di masa yang akan datang. Masyarakat harus tahu bahwa keberhasilan merehabilitasi hutan mangrove akan berdampak pada adanya peningkatan pembangunan ekonomi- khususnya dalam bidang perikanan, pertambakan, industri, pemukiman, rekreasi dan lain-lain. Kayu tumbuhan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar, bahan dasar kertas, keperluan rumah tangga, obat dan minuman, dan masih banyak lagi lainnya. Hutan mangrove juga berfungsi untuk menopang kehidupan manusia, baik dari sudut ekologi, fisik, maupun sosial ekonomi misalnya untuk menahan ombak, menahan intrusi air laut ke darat, dan sebagai habitat bagi biota laut tertentu untuk bertelur dan pemijahannya. Hutan mangrove dapat pula dikembangkan sebagai wilayah baru dan untuk menambah penghasilan petani tambak dan nelayan, khususnya di bidang perikanan dan garam. Di samping itu, hutan mangrove sebagai suatu ekosistem di daerah pasang surut, kehadirannya sangat berpengaruh terhadap ekosistem-ekosistem lain di daerah tersebut. Pada daerah ini akan terdapat ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem estuari yang

saling berpengaruh antara ekosistem yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, terjadinya kerusakan/gangguan pada ekosistem yang satu tentu saja akan mengganggu ekosistem yang lain. Sebaliknya seperti diuraikan di atas keberhasilan dalam pengelolaan (rehabilitasi) hutan mangrove akan memungkinkan peningkatan penghasilan masyarakat pesisir khususnya para nelayan dan petani tambak karena kehadiran hutan mangrove ini merupakan salah satu faktor penentu pada kelimpahan ikan atau berbagai biota laut lainnya. Kedua, Supremasi Hukum Lingkungan yaitu Undang-undang no 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan, pengembangan hutan mangrove dan diberi penyuluhan atau wawasan mengenai arti penting lingkungan hutan mangrove, maka pemerintah harus menindaklanjuti dengan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Masyarakat baik perorangan maupun berkelompok atau perseorangan harus ditindak tegas bilamana melakukan pelanggaran. Dari hasil wawancara dengan masyarakat didapatkan bahwa selama ini yang terjadi adalah di samping pemerintah kurang dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aspek penegakan hukum pun sangat lemah.

Hasil uji chi square didapatkan bahwa hubungan antara persepsi dan partisipasi dalam rencana penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Sorong pada taraf signifikansi (α) = 0.05 didapatkan nilai X^2_{hit} (33.498) > X^2_{tabel} (9.488). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat berbeda nyata dalam penetapan KKP di Kota Sorong atau dengan kata lain hipotesis (H_0) ditolak pada derajat signifikansi (α) = 0,05. Dan hasil uji keeratan atau koefisien kontingensi (C) didapatkan nilai C = 0.38 atau berada pada tingkat

keeratan “rendah” (lihat Tabel 3.2). Hal ini menunjukkan hubungan yang rendah antara persepsi dan partisipasi masyarakat dalam penetapan kawasan konservasi perairan. Melihat hasil uji chi-square tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah harus bekerja keras dalam memulihkan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam penetapan KKP di Kota Sorong. Pemerintah hendaknya tidak hanya mendengarkan kepentingan sepihak saja namun juga merangkul masyarakat untuk memberdayakan kemampuan mereka. Pelatihan ketrampilan, menghidupkan kembali keselarasan antara kepentingan manusia dengan kelestarian alam. Peran Pemerintah sebagai katalisator/fasilitator dapat diwujudkan guna meminimalkan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, seperti terus meningkatkan partisipasi masyarakat yang mana masyarakat merupakan faktor yang rentan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Mengingat manfaat yang akan diperoleh dari penetapan Kawasan Konservasi ini sangat besar di masa mendatang.

F. Model Pendekatan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Sorong

Menurut Hadi (2001 : 26), kunci dari gagasan perencanaan transaktif dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih, dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Persepsi, dan partisipasi nelayan terhadap rencana penetapan kawasan konservasi perairan lebih diorientasikan pada kegiatan untuk menjaga dan mengawasi potensi ekosistem yang ada dari kerusakan, sehingga kawasan konservasi perairan di Kota Sorong dapat ditetapkan.

Dalam rencana penetapan KKP di Perairan Kota Sorong akan dikaji berdasarkan 7 (tujuh) langkah perencanaan yang dikenal dengan sebutan *the seven magic steps of planning*, dimulai dari bagaimana merumuskan masalah, menetapkan tujuan, analisis kondisi, mencari alternatif solusi, memilih alternatif terbaik, mengkaji alternatif pilihan dan mengimplementasikan. Dengan menggunakan pendekatan *the seven magic steps of planning*, diharapkan akan diperoleh suatu keputusan tentang rencana penetapan KKP

Penerapan masing-masing unsur dari ketujuh langkah perencanaan diatas agar diperoleh suatu model pengelolaan, didasarkan atas hasil observasi lapangan, wawancara dengan kuesioner maupun wawancara mendalam dengan masyarakat, dan hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa instansi. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan masalah

Berdasarkan gambaran umum, kawasan pesisir Kota Sorong memiliki potensi ekosistem berupa hutan mangrove, daerah sepadan sungai dan terumbu karang. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan penetapan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut:

- Semakin rusaknya hutan mangrove, sepadan sungai dan terumbu karang akibat perilaku manusia.
- Adanya penebangan mangrove dan terumbu karang untuk bahan bangunan dsb.
- Banyaknya sampah yang menutupi daerah sepadan pantai dan hutan mangrove
- Banyaknya sedimentasi (lumpur) yang menutupi karang.

- Adanya alur pelayaran yang mengancam ekosistem terumbu karang dan mangrove

2. Menetapkan tujuan

Menetapkan kawasan Konservasi Perairan di Kota Sorong sehingga potensi sumberdaya Pesisir Kota Sorong dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

3. Analisis Kondisi

Untuk mengkaji fakta, dipergunakan analisis SWOT yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). yaitu suatu metode analisis yang akan menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di wilayah perairan Kota Sorong, serta kendala-kendala yang harus dihadapi dalam suatu proses perencanaan.

- *Strength* (kekuatan) yaitu :

- (1) Adanya kawasan hutan mangrove dan terumbu karang sebagai daerah pemijahan dan daerah pembesaran bagi sumberdaya akuatik dan juga sebagai penahan garis pantai terhadap abrasi dan terjangan ombak
- (2) Masyarakat terutama nelayan memiliki kemauan dan kemampuan untuk mempertahankan kelestarian kawasan hutan mangrove dan terumbu karang

- *Weaknesses* (kelemahan) yaitu :

- (1) Masyarakat terutama nelayan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan upaya pelestarian dan tidak memahami arti pentingnya kawasan konservasi

- (2) Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah daerah tentang RTRW Kawasan Konservasi Perairan
- (3) Kurangnya daya dukung Daerah Sepadan Sungai dan daerah sepadan pantai karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah

- *Opportunity* (peluang) yaitu :

- (1) Berdasarkan hasil penelitian Tim POKJA Zonasi Kota Sorong tahun 2012 bahwa:
 - a. kota Sorong memiliki Potensi kawasan hutan mangrove yang dapat di jadikan kawasan konservasi sekitar 15.510 ha., yang tersebar di Distrik Sorong Manoi, Sorong Timur dan Sorong Kepulauan
 - b. Berdasarkan hasil analisis citra alos, juga di dapatkan nilai kelayakan perlindungan dan rehabilitasi untuk kawasan terumbu karang seluas 108.74 hektar dengan masing-masing untuk konservasi seluas 61.95 hektar atau seluas 56.97 % dari total luasan dan untuk rehabilitasi terumbu seluas 46.79 hektar atau senilai 43.03 %.
- (2) Adanya perhatian dari berbagai pihak dalam mendukung penetapan kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang

- *Treath* (ancaman) yaitu :

- (1) Adanya penebangan mangrove dan terumbu karang untuk bahan bangunan dsb.

- (2) Banyaknya sampah yang menutupi daerah sepadan pantai dan hutan mangrove
- (3) Banyaknya sedimentasi (lumpur) yang menutupi karang.
- (4) Adanya alur pelayaran yang mengancam ekosistem terumbu karang dan mangrove

Berdasarkan tahapan analisis kondisi diatas, maka dibuatkan suatu matrik (matrik SWOT) untuk dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang terjadi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (Rangkuti, 2001). Untuk jelasnya matrik SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut :

Tabel 4.24 Matriks SWOT Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Sorong

	<i>Strength (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
	1. Adanya kawasan hutan mangrove dan terumbu karang sebagai daerah pemijahan dan daerah pembesaran bagi sumberdaya akuatik dan juga sebagai penahan garis pantai terhadap abrasi dan terjangan ombak	1. Masyarakat terutama nelayan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan upaya pelestarian dan tidak memahami arti pentingnya kawasan konservasi

	mempertahankan kelestarian kawasan hutan mangrove dan terumbu karang	Perairan 3. Kurangnya daya dukung Daerah Sepadan Sungai dan daerah sepadan pantai karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
<p>1. Berdasarkan hasil penelitian Tim POKJA Zonasi Kota Sorong tahun 2012 bahwa:</p> <p>c. kota Sorong memiliki Potensi kawasan hutan mangrove yang dapat di jadikan kawasan konservasi sekitar 15.510 ha., yang tersebar di Distrik Sorong Manoi, Sorong Timur dan Sorong Kepulauan</p> <p>d. Berdasarkan hasil analisis citra alos, juga di dapatkan nilai kelayakan perlindungan dan rehabilitasi untuk</p>	<p>1. Menetapkan kawasan hutan mangrove dan terumbu karang sebagai kawasan konservasi perairan melalui peraturan daerah</p> <p>2. Penguatan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dan penguatan sosial, ekonomi</p>	<p>1. Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat terutama masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tentang pentingnya ekosistem hutan mangrove dan terumbu karang bagi sumberdaya akuatik serta keberlanjutannya</p> <p>2. Membuat peraturan daerah tentang larangan pembuangan sampah di daerah sepadan sungai dan sepadan pantai</p>

<p>kawasan terumbu karang seluas 108.74 hektar dengan masing-masing untuk konservasi seluas 61.95 hektar atau seluas 56.97 % dari total luasan dan untuk rehabilitasi terumbu seluas 46.79 hektar atau senilai 43.03 %.</p> <p>2. Adanya perhatian dari berbagai pihak dalam mendukung penetapan kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang</p>		
<p>Threats (T)</p> <p>1. Adanya penebangan mangrove dan terumbu karang untuk bahan bangunan dsb.</p> <p>2. Banyaknya sampah yang menutupi daerah sepadan</p>	<p>Strategi ST</p> <p>1. Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat terutama masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tentang</p>	<p>Strategi WT</p> <p>1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan mangrove dan terumbu karang</p>

<p>pantai dan hutan mangrove</p> <p>3. Banyaknya sedimentasi (lumpur) yang menutupi karang.</p> <p>4. Adanya alur pelayaran yang mengancam ekosistem terumbu karang dan mangrove</p>	<p>pentingnya ekosistem hutan mangrove dan terumbu karang bagi sumberdaya akuatik serta keberlanjutannya</p> <p>2. Membuat peraturan daerah tentang larangan pembuangan sampah di daerah sepadan sungai dan sepadan pantai.</p> <p>3. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melestarikan perairan pantai dari hulu (DAS) sampai hilir (muara sungai)</p> <p>4. Menetapkan alur pelayaran yang tidak mengganggu ekosistem mangrove dan terumbu karang</p>	<p>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam sosialisasi RTRW Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>3. Membuat peraturan daerah tentang larangan pembuangan sampah di daerah sepadan sungai dan sepadan pantai.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Mencari alternatif solusi

- Kemauan yang kuat dari masyarakat untuk melestarikan potensi hutan mangrove dan terumbu karang semakin meningkatkan keputusan dalam penetapan KKP di Kota Sorong untuk mewujudkan KKP berbasis masyarakat dengan jalan melibatkan peranserta nelayan dan masyarakat pesisir untuk ikut menjaga dan melestarikannya.
- Keinginan yang kuat dari masyarakat untuk melestarikan potensi pariwisata memerlukan dorongan dari Pemerintah berupa peraturan perlindungan potensi ekosistem di KKP, sehingga masyarakat memiliki pedoman dalam menjaga dan melestarikan potensi tersebut
- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pelestarian potensi ekosistem di KKP sehingga masyarakat lebih mengerti apa yang harus dilakukan untuk melestarikan potensi tersebut dalam rangka mewujudkan KKP berbasis masyarakat.
- Pemerintah menetapkan aturan perlindungan potensi ekosistem di KKP melakukan penanganan terhadap kerusakan yang terjadi pada potensi ekosistem tersebut.
- Mengurangi aliran lumpur yang dibawa oleh aliran sungai dan menutupi terumbu karang dengan jalan melakukan pengelolaan wilayah pesisir sebagai satu kesatuan ekosistem dari hulu (DAS) sampai hilir (pantai) dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

5. Memilih alternatif terbaik

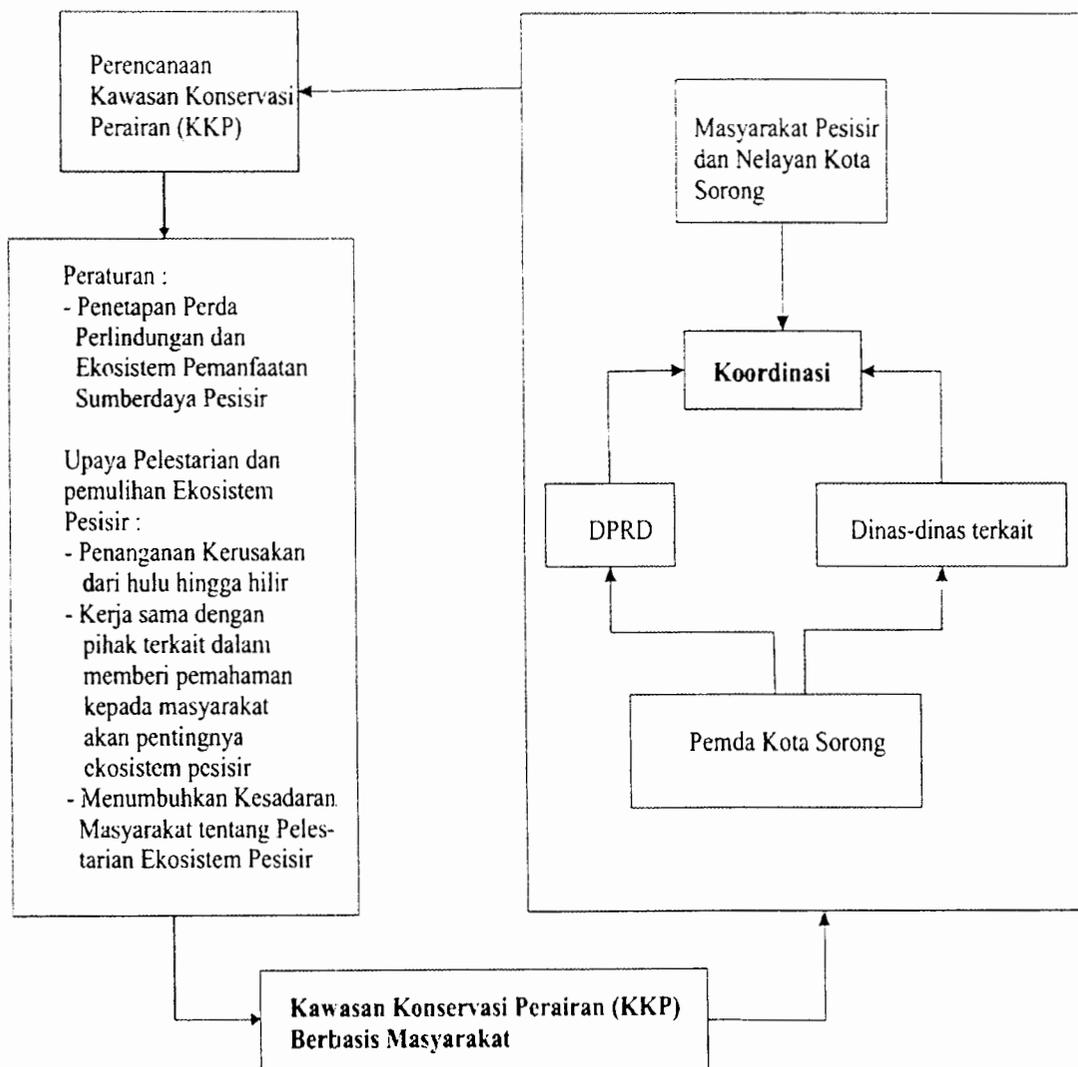
Dari beberapa alternatif diatas, maka ditetapkan alternatif terbaik sebagai berikut:

- Pemerintah menetapkan aturan (Perda) perlindungan potensi ekosistem di KKP melakukan penanganan terhadap kerusakan yang terjadi pada potensi ekosistem tersebut.
- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pelestarian potensi ekosistem di KKP sehingga masyarakat lebih mengerti apa yang harus dilakukan untuk melestarikan potensi tersebut dalam rangka mewujudkan KKP berbasis masyarakat.

6. Mengkaji alternatif pilihan

- Penetapan peraturan (Perda) perlindungan kawasan dilakukan dengan maksud memberikan kepastian dan pedoman kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem di KKP Kota Sorong.
- Penanganan kerusakan dilakukan dengan memandang kawasan sebagai satu kesatuan ekosistem dari hulu hingga bilir, karena kondisi daerah hulu akan memberikan pengaruh kepada daerah hilir. Apabila penanganan dilakukan pada daerah tertentu saja, maka tujuan penetapan KKP tidak akan dapat tercapai secara maksimal.
- Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait, karena masyarakat pesisir berhadapan langsung dengan potensi dan sumberdaya alam yang ada. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, maka segala upaya yang dilakukan pemerintah akan sulit untuk dilaksanakan.

Dari berbagai pilihan alternatif diatas, maka perencanaan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kota Sorong dapat di rumuskan model Strategi Penetapan Kawasan konservasi Perairan sebagaimana terlihat pada Bagan 4. 2.



Bagan 2. Model Perencanaan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kota Sorong

7. Mengimplementasikan

- Dalam menetapkan peraturan perlindungan ekosistem di kawasan konservasi perairan Kota Sorong, harus memperhatikan masukan dan saran dari masyarakat, yang pada saat ini kepada Pemerintah Kota Sorong untuk

diajukan sebagai Peraturan Daerah. Peraturan perlindungan kawasan konservasi yang akan dibuat tidak saja mengatur pengelolaan kawasan konservasi, akan tetapi harus mengatur keseluruhan kawasan Pesisir Kota Sorong sebagai satu kesatuan ekosistem mulai dari hulu sampai hilir (pantai).

- Materi yang tercantum dalam peraturan perlindungan kawasan juga harus mencakup beberapa bentuk larangan dan kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan aktivitas masyarakat pesisir, nelayan dan pemerintah daerah.
- Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi mengenai upaya pelestarian ekosistem pesisir, sehingga tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat semakin meningkat. Apabila masyarakat sudah mengerti, maka akan muncul rasa memiliki terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.
- Sosialisasi dan penyuluhan dapat dilaksanakan bekerjasama dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, maupun pemegang hak ulayat daerah adat.
- Dalam menangani kerusakan terumbu karang, maka diupayakan untuk melaksanakan tranplantasi karang buatan, dengan memakai beton, bodi mobil atau kapal, dan cara-cara lain mennumbuhkan terumbu karang.
- Melakukan kerjasama dengan masyarakat kawasan pesisir dan nelayan untuk tetap menjaga dan mengawasi ekosistem kawasan pesisir agar kerusakan yang terjadi dapat diminimalkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi dan partisipasi nelayan terhadap penetapan kawasan konservasi laut Kota Sorong dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nelayan mempunyai **tingkat persepsi** rendah hingga sedang 53,19% responden sangat mendukung 35% cukup mendukung dan 11,14% kurang mendukung rencana penetapan kawasan konservasi di Kota Sorong walaupun nelayan sangat menyadari arti pentingnya kawasan konservasi terhadap sumberdaya perairan.
2. Nelayan mempunyai **tingkat partisipasi** rendah (37%-56%) dimana masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan penebangan mangrove, sedangkan dalam pengawasan partisipasinya rendah hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pentingnya hutan mangrove.
3. Hasil uji chi square didapatkan bahwa hubungan antara persepsi dan partisipasi dalam rencana penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Sorong pada taraf signifikansi (α) = 0.05 didapatkan nilai X^2 hit (33.498) > X^2 tabel (9.488). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat berbeda nyata dalam penetapan KKP di Kota Sorong atau dengan kata lain hipotesis (H_0) ditolak pada derajat signifikansi (α) = 0,05. Dan hasil uji keceratan atau koefisien kontingensi C didapatkan nilai $C = 0,38$ atau berada pada tingkat keceratan "rendah".
4. Peran pemerintah dalam penetapan Kawasan konservasi pada Kelurahan Pulau

Raam, Pulau Soop, dan Remu Selatan tergolong pada tingkat peran “sedang” (54,3%-64,58%) sedangkan pada kelurahan Saoka dan Klaligi tergolong “rendah”

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dikemukakan beberapa alternatif yang dapat disarankan agar pelestarian potensi sumberdaya terutama ekosistem mangrove, terumbu karang dan daerah sepadan pantai di kawasan Perairan Kota Sorong dapat diwujudkan untuk Kawasan Konservasi Perairan, yaitu :

1. Bagi Pemerintah

- a. Dalam perencanaan pengelolaan terhadap Kawasan Pariwisata Lovina terutama potensi andalan pariwisata yang ada, agar selalu melibatkan peranserta masyarakat karena tanpa adanya peranserta masyarakat dalam suatu kebijakan, maka tujuan yang diinginkan tidak dapat dicapai secara maksimal.
- b. Perlu adanya penyuluhan yang lebih sering kepada masyarakat kawasan Pesisir Kota Sorong, terutama menyangkut materi konservasi seperti sosialisasi peraturan perlindungan satwa dan fauna langka, bagaimana menjaga dan melestarikan potensi sumberdaya yang ada, serta tindakan yang dilakukan untuk melestarikan potensi tersebut.
- c. Dalam upaya pelestarian terhadap potensi ekosistem mangrove dan terumbu karang agar lebih mengidentifikasi penyebab rusaknya sehingga dapat ditangani untuk mengurangi kerusakan yang akan terjadi lebih lanjut.
- d. Mengingat kerusakan terumbu karang sebagian besar disebabkan karena

lumpur, maka dalam penanganannya harus dilakukan dengan memandang kawasan pesisir Kota Sorong sebagai satu kesatuan ekosistem dari hulu sungai (DAS) sampai hilir (pantai).

2. Bagi Masyarakat

- a. Karena masih banyaknya penebangan hutan mangrove dan terumbu karang untuk bahan bangunan, maka masyarakat pesisir dan nelayan, hendaknya dapat lebih meningkatkan lagi persepsi, dan partisipasi dalam pelestarian lingkungan pantai dengan jalan menjaga dan memelihara keberadaan kawasan pesisir secara keseluruhan.
- b. Perlu adanya kerjasama antar masyarakat untuk saling mengawasi dan menjaga potensi sumberdaya pesisir agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut.

3. Bagi Penelitian Lanjutan

1. Melakukan penelitian pada kawasan pesisir di daerah lain di Papua Barat dan Papua terutama pada kawasan pesisir yang memiliki potensi sumberdaya spesifik seperti ekosistem mangrove dan terumbu karang serta kawasan sepadan pantai.
2. Meneliti lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang lebih mikro seperti kandungan zat-zat terlarut, parameter oseanografi perairan yang mempengaruhi keberadaan ekosistem pesisir di Kota Sorong secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agardy, T.S. 1997. *Marine Protected Areas and Ocean Conservation*. Academic Press.Inc., San Diego, California.
- Bengen D.G. 2002. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Bogor.
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, M.J. Sitepu. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1997. *Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove di Indonesia*. Jakarta
- Gorre, I. R. L. 1999. *The Basic of Appropriate Dispute Resolution: A Must Read for Coastal Manager Tropical Coasts*. Tropical Coast (6), p.3 – 7.
- Gultom. 1985. *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*. UKSW. Salatiga.
- Hadi, Sudharto P, 2000, *Manusia dan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hardjasoemantri, Kusnadi, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Keenam, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Irianto, 2002. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan wilayah Pesisir, Kecamatan Bonang Demak*. Program Pascasarjana MSDP UNDIP. Semarang.
- Kaimuddin, A.H. 2012. *Strategi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Berbasis Kelimpahan dan Biomassaa serta Partisipasi Masyarakat*. Program Pascasarjana MSDP UNDIP. Semarang
- Karim A, dkk. 2011. *SLHE Status Lingkungan Hidup Ekoregion Papua*. Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Mardijono, (2008). *Persepsi dan Partisipasi Nelayan terhadap Pengelolaan KKLD Kota Batam*. Program Pascasarjana MSDP UNDIP. Semarang
- Ndraha, T. 1982. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bina Aksara. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2009. *Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Robin, Stepent. 1996. *Perilaku Organisasi*. PT. Prenhalindo. Jakarta.
- Salm, V.R., J.R. Clark and E. Siirila. 2000. *Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers*. Third Edition. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Gland Switzerland.
- Saptorini, 2003. *Persepsi dan Partisipasi dalam Pelaksanaan Konsevasi Hutan Mangrove di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. Program Pascasarjana MSDP UNDIP. Semarang.

- Saragih, F. 2011. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Provinsi Sumatera Utara*. Program Pascasarjana MIL UNDIP. Semarang
- Sastropoetro. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung.
- Savitri, L.A. dan M. Khazali.1999. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Bogor: Wetlands International Indonesia Programme.
- Siallagan N.H.D, 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Konservasi Sabuk Hijau di Kawasan Waduk Jatibarang*. Program Pascasarjana MIL UNDIP. Semarang
- Soetrisno, L, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Jakarta.
- Sulistrianto. 2009. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan SD Pesisir dan Laut di Taman Nasional Karimunjawa*. Program Pascasarjana MIL UNDIP. Semarang
- Suparti. 2008. *Kajian Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Hutan Mangrove di Desa Sungai Selon Kecamatan Sungai Selon Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung*. Universitas Panca Sakti. Tegal.
- Suryaningsih, W.H. 2012. *Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo*. Program Pascasarjana MIL UNDIP. Semarang
- Tim POKJA Zonasi Kota Sorong. 2012. *Laporan Akhir Penyusunan RZWP3K Kota Sorong*. Loka PSPL Sorong. Sorong.
- Tjokroamindjoyo, B. 1997. *Perencanaan Pembangunan*. C.V. Mas Agung. Jakarta.
- Wahyudi ,A.1994. *Manajemen strategic Pengantar Proses Berpikir Strategik*. Galia Jakarta.
- Wibowo, R. 2003. *Program Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3PMD) dalam Pembangunan Sektor Lingkungan*. Makalah pada Acara Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pola PRA yang diselenggarakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Cilacap. Cilacap.
- Wirawan, S. 1983. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Rajawali. Jakarta.
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990. “Tentang Konservasi Sumberdaya Alamhayati dan Ekosistemnya”.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Wilayah Lingkungan Hidup

Lampiran 1. Instrument Observasi

1. Potensi SDA di lokasi penelitian
2. Potensi SDM di lokasi penelitian
3. Potensi sosial budaya, ekonomi dan ekologi di lokasi penelitian

Daftar Isian Wawancara**Panduan wawancara untuk tokoh masyarakat/anggota masyarakat**

1. Apakah anda mengetahui potensi sumberdaya perikanan di wilayah perairan Kota Sorong?
2. Sejauh ini apakah anda mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir terutama nelayan?
3. Apakah anda mengetahui rencana tataruang kawasan konservasi perairan di Kota Sorong?
4. Apakah anda terlibat dalam perencanaan RTRW kawasan konservasi perairan?
5. Apakah menurut anda RTRW bermanfaat bagi masyarakat pesisir terutama nelayan dalam rangka peningkatan perekonomian lokal?

Daftar Isian Kuesioner**A. Identitas Responden**

1. Nama kelurahan :
2. Nama responden :
3. Umur :
4. Pekerjaan Utama :

5. Tingkat pendidikan :
6. Pendapatan :
7. Lama tinggal di kelurahan : a. < 5 tahun b. 5-10 tahun c. > 10 tahun
8. Jumlah tanggungan keluarga : a. < 6 orang b. 6-9 orang c. > 9 orang

B. Persepsi Masyarakat

1. Bagaimana anda menilai kondisi mangrove di sekitar kelurahan anda?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Rusak
 - d. Sangat rusak
2. Bagaimana anda menilai kondisi sungai di sekitar kelurahan anda?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Rusak
 - d. Sangat rusak
3. Bagaimana anda mengetahui potensi kawasan sungai dan mangrove yang akan dijadikan sebagai kawasan konservasi?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Rusak
 - d. Sangatrusak

4. Menurut anda apakah masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan RTRW KKP di Kota Sorong?
 - a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Kurang perlu
 - d. Tidak perlu
5. Menurut anda apakah kawasan konservasi tersebut bermanfaat atau penting bagi masyarakat pesisir terutama nelayan?
 - a. Sangat bermanfaat
 - b. Bermanfaat
 - c. Cukup bermanfaat
 - d. Tidak bermanfaat
6. Apakah anda mengetahui aturan dari Kawasan Konservasi?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup tahu
 - d. Tidak tahu
7. Apakah anda mengetahui sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika ada yang melanggar?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup tahu
 - d. Tidak tahu

8. Menurut anda apakah kawasan konservasi perlu dipertahankan atau dilestarikan?
 - a. Sangat perlu
 - b. Cukup perlu
 - c. Perlu
 - d. Tidak perlu
9. Bagaimana tanggapan anda mengenai RTRW KKP di Kota Sorong?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju

C. Partisipasi

1. Apa yang anda lakukan dalam pemanfaatan mangrove?
 - a. Menanam
 - b. Tidak menebang
 - c. Mengambil secara beraturan
 - d. Mengambil sesuka hati
2. Eksploitasi terhadap mangrove?
 - a. Tidak mengambil/mengganggu mangrove
 - b. Menggunakan mangrove untuk sebagian untuk kayu bakar
 - d. Mengambil karang untuk kegiatan pembangunan
3. Apakah anda mengikuti kegiatan dan aktif dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan untuk konservasi lingkungan?

- a. sangatsering (15 kali)
 - b. sering (7-14 kali)
 - c. tidak sering (1-6 kali)
 - d. tidak pernah sama sekali
4. Bagaimana keterlibatan anda dalam mengikuti kegiatan penanaman mangrove?
- a. sangat sering (5 kali)
 - b. sering (3-4 kali)
 - c. tidak sering (1-2 kali)
 - d. tidak pernah sama sekali
5. Dalam kurun waktu satu tahun berapa kali anda melakukan penebangan bakau?
- a. tidak pernah
 - b. 1-3 kali
 - c. 4 -7 kali
 - d. > 7 kali
6. Apakah anda pernah menyampaikan usulan kepada pemerintah dalam perencanaan RTRW KKP?
- a. sangat sering
 - b. sering
 - c. tidak sering
 - d. tidak pernah
- dalam forum apa anda menyampaikan
7. Seberapa sering anda pernah mengikuti pengawasan?
- a. sangatsering (12 kali)
 - b. sering (6-11 kali)

- c. tidaksering (1-5 kali)
 - d. tidakpernahsamasekali
8. Dalam destructive fishing
- a. menangkap ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan
 - b. menangkap dengan trawl
 - c. menangkap ikan dengan racun
 - d. menangkap ikan dengan bom
9. Menurut anda apakah kebijakan RTRW KKP Kota Sorong sudah aspiratif ?
- a. Sangat aspiratif
 - b. aspiratif
 - c. kurang aspiratif
 - d. tidak aspiratif

D. Peran Pemerintah

1. apakah anda pernah menerima informasi tentang RTRW KKP di Kota Sorong
- a. sangat sering
 - b. sering
 - c. jarang
 - d. tidak pernah

darimana anda mendapatkan informasi mengenai RTRW KKP di Kota Sorong

.....

2. Bagaimana sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan mangrove?
- a. Sangat sering (12 kali)

- b. Sering (8-10 kali)
 - c. Tidak sering (1-3 kali)
 - d. Tidak pernah sama sekali
3. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi di kelurahan anda?
- a. Sangat bagus
 - b. Bagus
 - c. Kurang bagus
 - d. Tidak bagus
4. Bagaimana pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengelola kawasan konservasi di tempat anda?
- a. Sangat bagus
 - b. Bagus
 - c. Kurang bagus
 - d. Tidak bagus
5. Bagaimana peran pemerintah dalam penghijauan hutan mangrove?
- a. Sangat bagus
 - b. Bagus
 - c. Kurang bagus
 - d. Tidak bagus
6. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap daerah konservasi?
- a. Sangat bagus
 - b. Bagus

c. Kurang bagus

d. Tidak bagus

Lampiran : 2 a

Persepsi Masyarakat tentang Penetapan Kawasan konservasi di Kota Sorong

RAAM	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	0	0	0	0	0	0	1	4	10	40	0	0	0	0	12	48	10	40
	3	18	54	22	66	11	33	12	36	9	27	0	0	0	0	8	24	13	39
	2	11	22	9	18	17	34	18	36	5	10	7	14	5	10	7	14	8	16
	1	2	2	0	0	3	3	0	0	7	7	24	24	26	26	4	4	0	0
Jumlah		78		84		70		76		84		38		36		90		95	
Presentase	%	62.90		67.74		56.45		61.29		67.74		30.65		29.03		72.58		76.61	

Remu selatan	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	0	0	0	0	0	0	2	8	27	108	2	8	0	0	27	108	19	76
	3	0	0	0	0	0	0	28	84	18	54	31	93	24	72	14	42	28	84
	2	19	38	20	40	23	46	19	38	4	8	16	32	25	50	8	16	2	4
	1	30	30	29	29	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		68		69		72		130		170		133		122		166		49	164
Presentase	%	34.69		35.20		36.73		66.33		86.73		67.86		62.24		84.69		83.67	

Saoka	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	0	0	0	0	0	0	4	16	17	68	0	0	4	16	9	36	9	36
	3	0	0	10	30	16	48	38	114	26	78	2	6	22	66	19	57	31	93
	2	30	60	33	66	29	58	2	4	2	4	8	16	11	22	16	32	4	8
	1	15	15	2	2	0	0	1	1	0	0	35	35	8	8	1	1	1	1
Jumlah		75		98		106		135		150		57		112		126		138	
Presentase	%	41.67		54.44		58.89		75.00		83.33		31.67		62.22		70.00		76.67	

Soop	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	0	0	0	0	0	0	9	36	11	44	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	22	66	26	78	21	63	19	57	17	51	0	0	0	0	11	33	6	18
	2	6	12	2	4	7	14	0	0	0	0	19	38	6	12	17	34	17	34
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	22	0	0	5	5
Jumlah		78		82		77		93		95		47		34		67		57	
Presentase	%	69.64		73.21		68.75		83.04		84.82		41.96		30.36		59.82		50.89	

Klaligi	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	0	0	0	0	0	0	0	14	56	0	0	0	0	40	160	2	8	
	3	0	0	0	0	0	0	29	87	34	102	0	0	0	7	21	43	129	
	2	38	76	41	82	36	72	19	38	0	0	8	16	3	6	1	2	3	6
	1	10	10	7	7	12	12	0	0	0	0	40	40	45	45	0	0	0	0
Jumlah		86		89		84		125		158		56		51		183		143	
Presentase	%	44.79		46.35		43.75		65.10		82.29		29.17		26.56		95.31		74.48	

Maks = 1116
 Min = 279
 Kelas Interval : 837 - 1116 (Tinggi)
 558 - 837 (Sedang)
 279 - 558 (Rendah)
 651
 58.33

Maks = 1764
 Min = 441
 Kelas Interval : 1323 - 1764 (Tinggi)
 882 - 1323 (Sedang)
 441 - 882 (Rendah)
 1094
 62.02

Maks = 1620
 Min = 405
 Kelas Interval : 1215 - 1620 (Tinggi)
 810 - 1215 (Sedang)
 405 - 810 (Rendah)
 997
 61.54

Maks = 1008
 Min = 252
 Kelas Interval : 756 - 1008 (Tinggi)
 504 - 756 (Sedang)
 252 - 504 (Rendah)
 630
 62.50

Maks = 1728
 Min = 432
 Kelas Interval : 1296 - 1728 (Tinggi)
 864 - 1296 (Sedang)
 432 - 864 (Rendah)
 975
 56.42

Lampiran 2 b
Partisipasi Masyarakat dalam penetapan kawasan konservasi di Kota Sorong

RAAM	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	1	4	1	4	0	0	0	0	2	8	0	0	0	5	24	14	0	0
	3	0	0	8	24	0	0	0	0	2	6	0	0	5	15	4	12	8	24
	2	11	22	12	24	13	26	13	26	3	6	8	16	12	24	0	0	20	40
	1	19	19	10	10	18	18	18	18	24	24	23	23	14	14	3	3	3	3
Frekuensi			45		62		44		44		44		39		58		29		67
Presentase	%		36.29		50.00		35.48		35.48		35.48		31.45		42.74		89.52		54.03

Maks = 1116
Min = 279
Kelas Interval : 837 - 1116 (Tinggi)
558 - 837 (Sedang)
279 - 558 (Rendah)
432
38.71

Remu selatan	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	32	128	0	0
	3	0	0	0	0	23	69	7	21	24	72	20	60	1	3	14	42	27	81
	2	19	38	32	64	26	52	34	68	21	42	29	58	32	64	3	6	22	44
	1	30	30	17	0	0	8	8	3	3	0	0	16	16	0	0	0	0	0
Frekuensi			68		81		121		97		121		118		83		176		125
Presentase	%		34.69		41.33		61.73		49.49		61.73		60.20		42.35		89.80		63.78

Maks = 1764
Min = 441
Kelas Interval : 1323 - 1764 (Tinggi)
882 - 1323 (Sedang)
441 - 882 (Rendah)
990
56.12

Saoka	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	1	4	0	0	0	0	4	16	6	24	0	0	7	28	34	136	1	4
	3	1	3	1	3	1	3	13	39	24	72	16	48	10	30	6	18	6	18
	2	14	28	32	64	9	18	23	46	11	22	22	44	22	44	2	4	15	30
	1	29	29	12	12	35	35	5	5	4	4	7	7	6	6	3	3	23	23
Frekuensi			64		79		56		106		122		99		108		161		75
Presentase	%		35.56		43.89		31.11		58.89		67.78		55.00		60.00		89.44		41.67

Maks = 1620
Min = 405
Kelas Interval : 1215 - 1620 (Tinggi)
810 - 1215 (Sedang)
405 - 810 (Rendah)
870
53.70

Soop	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	13	52	16	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	76	0	0	
	3	0	0	12	36	16	48	14	42	14	42	0	0	0	9	27	18	54	
	2	15	30	0	0	12	24	14	28	13	26	15	30	14	28	0	0	10	20
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	13	14	14	0	0	0	0
Frekuensi			82		100		72		70		69		43		42		103		74
Presentase	%		73.21		89.29		64.29		62.50		61.61		38.39		37.50		91.96		66.07

Maks = 1008
Min = 252
Kelas Interval : 756 - 1008 (Tinggi)
504 - 756 (Sedang)
252 - 504 (Rendah)
655
64.98

Klaligi	Skore	PERTANYAAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	48	192	0	0	0	0	48	192	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18
	2	3	6	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	0	0	22	44
	1	45	45	40	40	48	48	48	48	0	0	48	48	41	41	0	0	20	20
Frekuensi			51		56		48		48		192		48		55		192		82
Presentase	%		26.56		29.17		25.00		25.00		100.00		25.00		28.65		100.00		42.71

Maks = 1728
Min = 432
Kelas Interval : 1296 - 1728 (Tinggi)
864 - 1296 (Sedang)
432 - 864 (Rendah)
772
44.68

Lampiran 2 c.

Peran pemerintah dalam penetapan Kawasan Konservasi di kota Sorong

RAAM	Skore	PERTANYAAN											
		1		2		3		4		5		6	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	11	33	22	66	15	45	0	0	0	0	15	45
	2	11	22	9	18	16	32	18	36	25	50	13	26
	1	9	9	0	0	0	0	13	13	6	6	3	3
Frekuensi		64		84		77		49		56		74	
Presentase	%	51.61		67.74		62.10		39.52		45.16		59.68	

Maks = 744
 Min = 186
 Kelas Interval : 558-744 (Tinggi)
 372 - 558 (Sedang)
 186 - 372 (Rendah)

404
 54.30

Remu selatan	Skore	PERTANYAAN											
		1		2		3		4		5		6	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	23	69	11	33	22	66	23	69	4	12	16	48
	2	24	48	35	70	27	54	26	52	40	80	33	66
	1	2	2	3	3	0	0	0	0	5	5	0	0
Frekuensi		119		106		120		121		97		114	
Presentase	%	60.71		54.08		61.22		61.73		49.49		58.16	

Maks = 1176
 Min = 294
 Kelas Interval : 882 - 1176 (Tinggi)
 588 - 882 (Sedang)
 294 - 588 (Rendah)

677
 57.57

Saaka	Skore	PERTANYAAN											
		1		2		3		4		5		6	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	4	12	1	3	9	27	6	18	4	12	0	0
	2	15	30	15	30	12	24	14	28	18	36	20	40
	1	26	26	29	29	24	24	25	25	23	23	25	25
Frekuensi		68		62		75		71		71		65	
Presentase	%	37.78		34.44		41.67		39.44		39.44		36.11	

Maks = 1080
 Min = 270
 Kelas Interval : 810 - 1080 (Tinggi)
 540 - 810 (Sedang)
 270 - 540 (Rendah)

412
 38.15

Soop	Skore	TANYAAN											
		1		2		3		4		5		6	
	4	0	0	0	0	6	24	0	0	15	60	0	0
	3	12	36	0	0	18	54	11	33	13	39	15	45
	2	16	32	15	30	4	8	17	34	0	0	13	26
	1	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Frekuensi		68		43		86		67		99		71	
Presentase	%	60.71		38.39		76.79		59.82		88.39		63.39	

Maks = 672
 Min = 168
 Kelas Interval : 504 - 672 (Tinggi)
 336 - 504 (Sedang)
 168 - 336 (Rendah)

434
 64.58

Klaligi	Skore	PERTANYAAN											
		1		2		3		4		5		6	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	17	51	0	0	11	33	0	0	0	0	0	0
	2	14	28	4	8	36	72	41	82	35	70	32	64
	1	17	17	44	44	1	1	7	7	13	13	16	16
Frekuensi		96		52		106		89		83		80	
Presentase	%	50.00		27.08		55.21		46.35		43.23		41.67	

Maks = 1248
 Min = 288
 Kelas Interval : 864 - 1248 (Tinggi)
 576 - 864 (Sedang)
 288 - 576 (Rendah)

506
 40.54

Lampiran 5.
Analisa SWOT

Faktor - Faktor Kekuatan Strategi Internal		SP	K	SP x K	Bobot
<i>Kekuatan (Strength)</i>		a	b	c	d
1	Adanya kawasan hutan mangrove dan terumbu karang	3	4	12	0.38
2	Dukungan masyarakat	1	4	4	0.13
3	Dukungan Pemerintah	4	4	16	0.50
Jumlah				32	1.00
<i>Kelemahan (Weakness)</i>		a	b	c	d
1	Rendahnya Pengetahuan masyarakat	3	4	12	0.33
2	Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah	1	4	4	0.11
3	Kurangnya daya dukung Daerah Sepadan Sungai dan daerah sepadan pantai	5	4	20	0.56
Jumlah				36	1.00

Faktor - Faktor Kekuatan Strategi Internal		Kode	Bobot	Ranking	Bobot x Ranking
<i>Kekuatan (Strength)</i>		a	b	c	d
1	Adanya kawasan hutan mangrove dan terumbu karang	S1	0.38	3	1.13
2	Dukungan masyarakat	S2	0.13	3	0.38
3	Dukungan Pemerintah	S3	0.50	4	2.00
Jumlah			1.00		3.50
<i>Kelemahan (Weakness)</i>		a	b	c	d
1	Rendahnya Pengetahuan masyarakat	W1	0.33	2	0.67
2	Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah	W2	0.11	1	0.11
3	Kurangnya daya dukung Daerah Sepadan Sungai dan daerah sepadan	W3	0.56	2	1.11
Jumlah			1.00		1.89
Total					5.39

Lampiran 5. lanjutan....

Faktor - Faktor Kekuatan Strategi Eksternal		SP	K	SP x K	Bobot
<i>Puluang (Opportunity)</i>		a	b	c	d
1	Kota Sorong memiliki Potensi kawasan hutan mangrove yang dapat di jadikan kawasan konservasi sekitar 15.510 ha.	3	4	12	0.38
2	Kota Sorong memiliki kawasan terumbu karang seluas 108.74 hektar	2	4	8	0.25
3	Adanya perhatian dari berbagai pihak dalam mendukung penetapan kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang	3	4	12	0.38
Jumlah				32	1.00
<i>Ancaman (Threats)</i>		a	b	c	d
1	Adanya penebangan mangrove dan terumbu karang untuk bahan bangunan dsb.	4	4	16	0.44
2	Banyaknya sampah yang menutupi daerah sepadan pantai dan hutan mangrove	1	4	4	0.11
3	Banyaknya sedimentasi (lumpur)	2	4	8	0.22
4	Alur pelayaran yang mengganggu ekosistem	2	4	8	0.22
Jumlah				36	1.00

Faktor - Faktor Kekuatan Strategi Eksternal		Kode	Bobot	Ranking	Bobot x Ranking
<i>Puluang (Opportunity)</i>		a	b	c	d
1	Kota Sorong memiliki Potensi kawasan hutan mangrove yang dapat di jadikan kawasan konservasi sekitar 15.510 ha.	O1	0.38	3	1.13
2	Kota Sorong memiliki kawasan terumbu karang seluas 108.74 hektar	O2	0.25	4	1.00
3	Adanya perhatian dari berbagai pihak dalam mendukung penetapan kawasan	O3	0.38	4	1.50
Jumlah			1.00		3.63
<i>Ancaman (Threats)</i>		a	b	c	d
1	Adanya penebangan mangrove dan terumbu karang untuk bahan bangunan dsb.	T1	0.44	2	0.89
2	Banyaknya sampah yang menutupi daerah sepadan pantai dan hutan	T2	0.11	1	0.11
3	Banyaknya sedimentasi (lumpur)	T3	0.22	2	0.44
4	Alur pelayaran yang mengganggu ekosistem	T4	0.22	2	0.44
Jumlah			1.00		1.89
Total					5.51

Lampiran 5. lanjutan....

IFAS	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kawasan hutan mangrove dan terumbu karang Dukungan masyarakat Dukungan Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya Pengetahuan masyarakat Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kurangnya daya dukung Daerah Sepadan Sungai dan daerah sepadan
Puluang (Opportunity)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> Kota Sorong memiliki Potensi kawasan hutan mangrove yang dapat di jadikan kawasan konservasi sekitar 15.510 ha. Kota Sorong memiliki kawasan terumbu karang seluas 108.74 hektar Adanya perhatian dari berbagai pihak dalam mendukung penetapan kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kawasan hutan mangrove dan terumbu karang sebagai kawasan konservasi perairan melalaui peraturan daerah Penguatan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dan penguatan sosial, ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat terutama masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tentang pentingnya ekosistem hutan mangrove dan terumbu karang bagi sumberdaya akuatik serta keberlanjutannya Membuat peraturan daerah tentang larangan pembuangan sampah di daerah sepadan sungai dan sepadan pantai
Ancaman (Threats)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> Adanya penebangan mangrove dan terumbu karang untuk bahan bangunan dsb. Banyaknya sampah yang menutupi daerah sepadan pantai dan hutan mangrove Banyaknya sedimentasi (lumpur) Alur pelayaran yang mengganggu ekosistem 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat terutama masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tentang pentingnya ekosistem hutan mangrove dan terumbu karang bagi sumberdaya akuatik serta keberlanjutannya Membuat peraturan daerah tentang larangan pembuangan sampah di daerah sepadan sungai dan sepadan pantai. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melestarikan perairan pantai dari hulu (DAS) sampai hilir (muara sungai) Menetapkan alur pelayaran yang tidak mengganggu ekosistem mangrove dan terumbu karang 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan mangrove dan terumbu karang <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam sosialisasi RTRW Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>Membuat peraturan daerah tentang larangan pembuangan sampah di daerah sepadan sungai dan sepadan pantai.</p>

Unsur SWOT/Alternatif Kebijakan Strategis dan Program	Keterkaitan	Bobot	Prioritas
1 Menetapkan kawasan hutan mangrove dan terumbu karang sebagai kawasan konservasi perairan melalaui peraturan daerah	S1,S2,S3,O1,O3	6.13	I
2 Penguatan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dan penguatan sosial, ekonomi	W2,O1,O3	2.74	IV
3 Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat terutama masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tentang pentingnya ekosistem hutan mangrove dan terumbu karang bagi sumberdaya akuatik serta keberlanjutannya	S1,S2,T1,T2,T3	3.82	III
4 Membuat peraturan daerah tentang larangan pembuangan sampah di daerah sepadan sungai dan sepadan pantai.	W2,W3, O3	2.72	V
5 Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melestarikan perairan pantai dari hulu (DAS) sampai hilir (muara sungai)	W1,W2,T1,T4	2.11	VI
6 Menetapkan alur pelayaran yang tidak mengganggu ekosistem mangrove dan terumbu karang	W2, T4	0.56	VII
7 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam sosialisasi RTRW Kawasan Konservasi Perairan	S2, S3, O3	3.88	II

Lampiran 5. lanjutan....

Prioritas Kebijakan berdasarkan Analisa SWOT

